

LKjIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **2024**

**DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU**





PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pekanbaru, 21 Maret 2025

INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,



SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA
Pembina Utama Madya
NIP 19710729 199302 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya dapat terus ditingkatkan.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini. Analisa ini untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan sasaran dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah berhasil dicapai. Dari tiga Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian indikator produksi daging dikategorikan sangat tinggi dengan capaian kinerja 104,94, capaian indikator persentase status kesehatan hewan termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan tingkat capaian 100,7% dan indikator Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dengan capaian 114,2% dengan kategori penilaian sangat tinggi.

Pencapaian target kinerja dari ketiga indikator tersebut dilakukan dengan strategi diantaranya peningkatan populasi ternak melalui inseminasi buatan, penyediaan pakan berkualitas, penyediaan bibit berkualitas, pengembangan SDM dan kelembagaan peternak, peningkatan prasarana peternakan, penurunan angka kematian dan peningkatan jumlah unit usaha yang menerapkan penjaminan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. ke depan. Tantangan tersebut antara lain :

- 1. Permasalahan utama dalam peningkatan produksi daging adalah lambatnya pertumbuhan populasi ternak karena angka kelahiran ternak yang masih tergolong rendah sebagai akibat belum maksimalnya upaya peningkatan kelahiran melalui Inseminasi Buatan dan Kawin Alam akibat keterbatasan jumlah SDM dan sarana prasarana serta belum diterapkannya GFP oleh peternak akibat keterbatasan pengetahuan dan modal peternak dalam menerapkan GFP.*
- 2. Permasalahan utama dalam pengendalian penyakit ternak/hewan adalah karena kurang terpantaunya lalu lintas ternak dari daerah/provinsi lain sehingga resiko masuknya penyakit hewan menular maupun eksotik dari daerah/provinsi lain semakin besar dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ternak dan hewan kesayangannya.*
- 3. Permasalahan utama dalam pemenuhan produk pangan yang ASUH adalah masih minimnya unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis Nomor Kontrol Veteriner (NKV) karena kurangnya kesadaran pelaku usaha. Disamping itu baru ada satu Rumah Potong Hewan Ruminansia yang sudah memiliki (NKV) sehingga penjaminan pangan asal hewan yang ASUH masih rendah walaupun telah mencapai target.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat karunia-Nya penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat diselesaikan. LKjIP disusun dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Semoga LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam mencapai target kinerja pada masa mendatang.

Pekanbaru, Maret 2025

PIL. KEPALA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU



Drs. HERI AFRIZON, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700709 199001 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi	2
1.3. Sumber Daya Manusia	6
1.4. Sarana dan Prasarana	8
1.5. Fungsi dan Tugas	8
1.6. Aspek Strategis Organisasi	15
1.7. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) Organisasi	16
1.8. Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	18
1.9. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	19
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	21
2.1. Rencana Strategis	21
2.2. Perjanjian Kinerja	25
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024.....	26
2.4. Instrumen Pendukung	27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	33
A . Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	33
B. Realisasi Anggaran	81
BAB IV. PENUTUP	83
4.1. Kesimpulan	83
4.2. Langkah Strategis	84

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	6
Tabel 1.2. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023 (orang)	7
Tabel 1.3. Data Aset/Modal pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	8
Tabel 1.4. Pemetaan Permasalahan Utama Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Riau	17
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.....	22
Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024	22
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Program SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024	24
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau	26
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	33
Tabel 3.2. Capaian Sasaran Strategis dengan Indikator Produksi Daging tahun 2024	35
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Daging Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun-Tahun Sebelumnya	36
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra.....	36
Tabel 3.5. Populasi Ternak	39
Tabel 3.6. Target dan Realisasi Inseminasi Buatan (IB) dan Kelahiran	40
Tabel 3.7. Target dan Realisasi IB tahun 2024	42
Tabel 3.8. Target dan realisasi Kelahiran Tahun 2024 pada 12 Kabupaten/kota	43

Tabel 3.9. Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan.....	48
Tabel 3.10. Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	48
Tabel 3.11. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Peningkatan Produksi Daging.....	49
Tabel 3.12. Perbandingan capaian kinerja Status Kesehatan Hewan Tahun 2024 dengan Tahun 2023	55
Tabel 3.13. Pelayanan Kesehatan Hewan	58
Tabel 3.14. Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan Indikator Persentase Status Kesehatan Hewan	62
Tabel 3.15. Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Indikator Persentase Status Kesehatan Hewan	63
Tabel 3.16. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Pening katan Persentase Status Kesehatan Hewan	64
Tabel 3.17. Capaian Kinerja Produk Asal Hewan yang ASUH	67
Tabel. 3.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Produk Asal Hewan yang ASUH Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun-Tahun sebelumnya	68
Tabel.3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	68
Tabel. 3.20 Jumlah Sampel yang di lakukan pengujian sampel	72
Tabel. 3.21 Jumlah Produk Hewan yang Masuk Ke Provinsi Riau	73
Tabel 3.22. Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan pada Indikator Persentase Produk Asal Hewan Yang ASUH	78
Tabel 3.23. Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Indikator Persentase Produk Asal Hewan Yang ASUH	79
Tabel 3.24. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Peningkatan Persentase Produk Asal Hewan yang ASUH	80
Tabel 3.25. Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024	81
Tabel.3.26. Realisasi Anggaran APBN Tahun 2024	8

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4
Gambar 1.2. Struktur Organisasi UPT. Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.....	5
Gambar 1.3. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Pendidikan.....	6
Gambar 1.4. Grafik Jumlah THLBerdasarkan Pendidikan.....	7
Gambar 1.5. Grafik Jumlah Pejabat Fungsional tertentu.....	7
Gambar 2.1. Tampilan aplikasi ISIKHNAS	28
Gambar 2.3. Tampilan Isikhnas di layar komputer	29
Gambar 3.1. Grafik Produksi Daging Tahun 2021-2024	37
Gambar 3.2. Grafik Produksi Ruminansia Tahun 2021-2024.....	37
Gambar 3.3. Grafik Produksi Daging Unggas Tahun 2021-2024	38
Gambar 3.4. Grafik Populasi Ternak Ruminasia dan Unggas.....	39
Gambar 3.5. Target dan Realisasi Inseminasi Buatan dan Kelahiran	40
Gambar 3.6. Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB)	44
Gambar.3.7. Anak Sapi Hasil Inseminasi Buatan	44
Gambar 3.8. Pembinaan Dan Pengawasan Manajemen Mutu Pakan	46

BAB. I

PENDAHULUAN

Bab I berisi :

1. Latar Belakang
2. Struktur Organisasi
3. Fungsi dan Tugas
4. SDM Organisasi
5. Sarana Prasarana
6. Aspek Strategis Organisasi
7. Permasalahan Utama
(Strategic Issued) Organisasi
8. Tindak lanjut Laporan Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
9. Sistematika Laporan Kinerja
Instansi

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Gubernur Riau dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan juga Perubahan Rencana Strategis tahun 2019-2024. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di masa yang akan datang.

Dengan disusunnya LKjIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
2. Mendorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Struktur Organisasi

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Keberadaan Dinas Peternakan Provinsi Riau sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah, diharapkan dapat membantu Gubernur membawa Riau melakukan pembangunan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka mendorong pembangunan daerah yang berkesinambungan.

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai struktur organisasi seperti pada Gambar 1.1. Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:

- a. Sekretariat, terdiri dari Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Bidang Produksi Peternakan.
- c. Bidang Kesehatan Hewan.
- d. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- e. Bidang Agribisnis Peternakan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

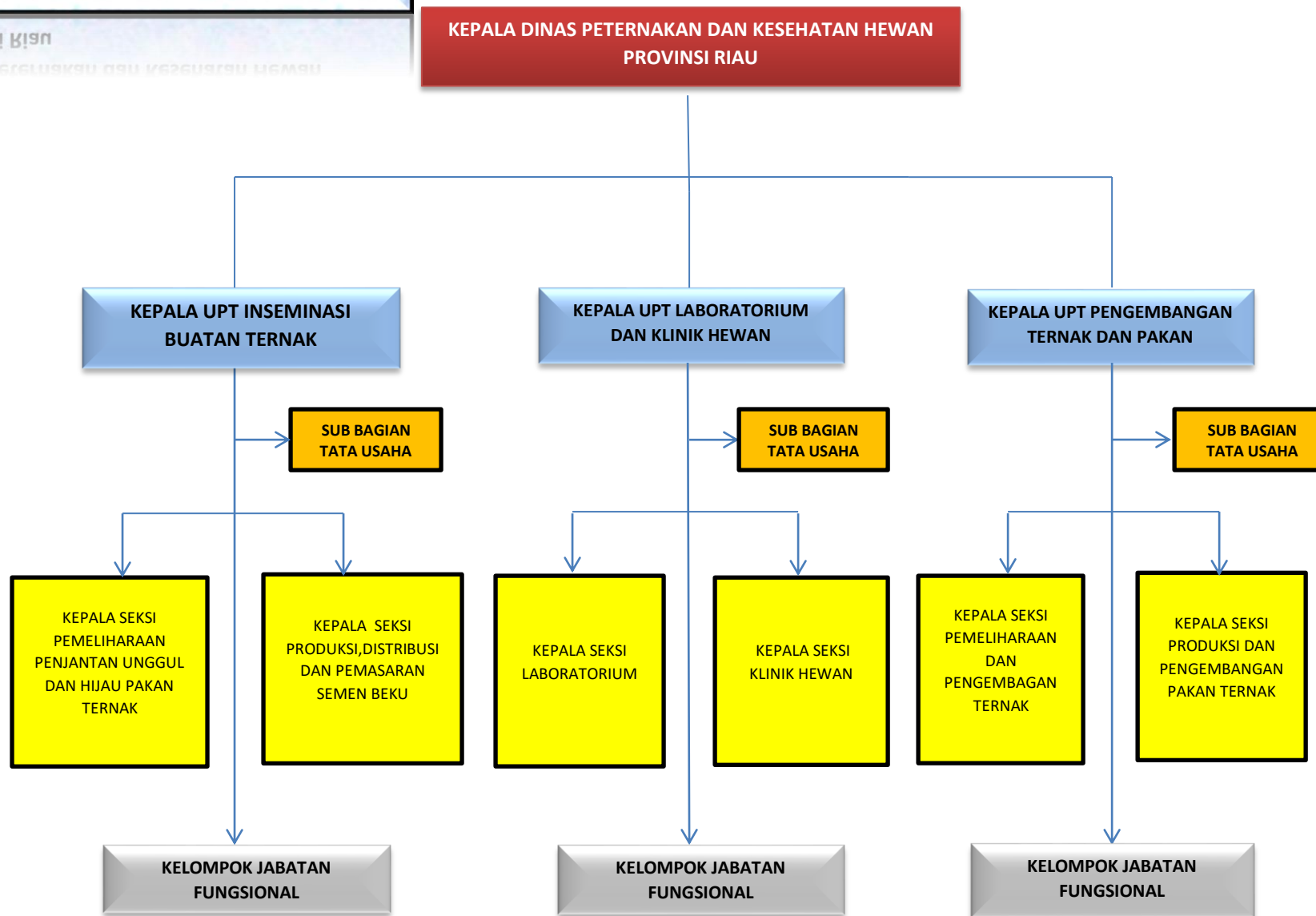
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Dinas memiliki 3 (tiga) UPT yakni UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan, UPT. Inseminasi Buatan Ternak dan UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan.

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas
Pernakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau**



Gambar 1.2. Struktur Organisasi UPT Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau



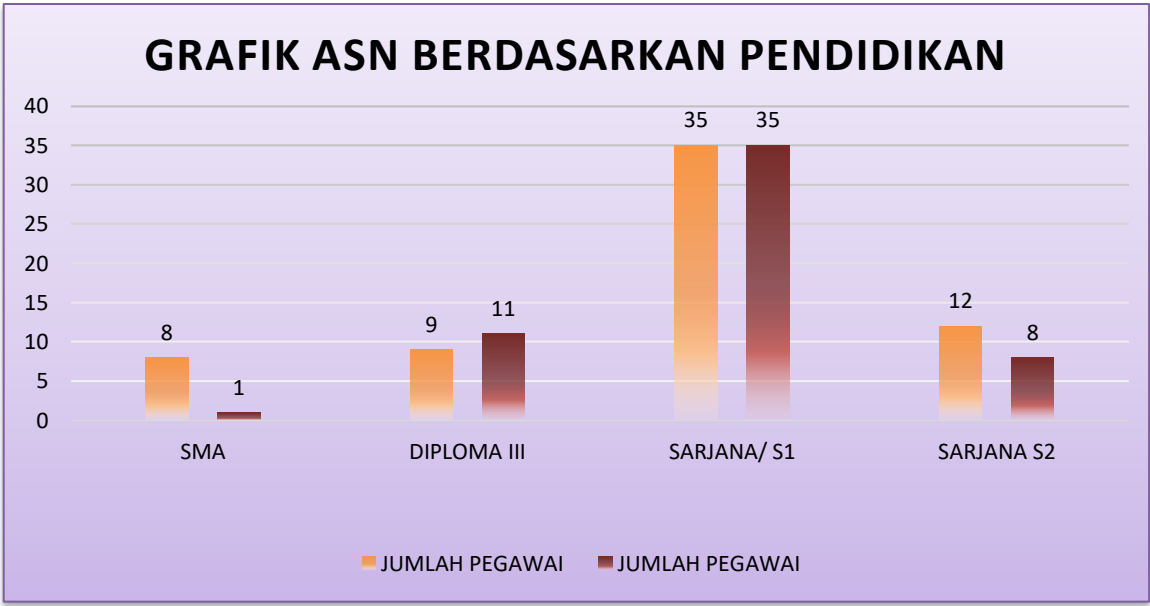
1.3. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kegiatan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada Tahun 2024 memiliki sumber daya manusia secara keseluruhan termasuk pada UPT sebanyak 295 orang yang terdiri dari 119 orang ASN dan 176 orang Non ASN/THL. Rincian ASN terdiri dari 19 orang pejabat struktural, 57 orang pejabat fungsional tertentu, 43 orang pejabat fungsional umum. Sedangkan THL terdiri dari 62 orang di Sekretariat dan Bidang, 115 orang di UPT. Komposisi pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, tingkat pendidikan, golongan maupun wilayah kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

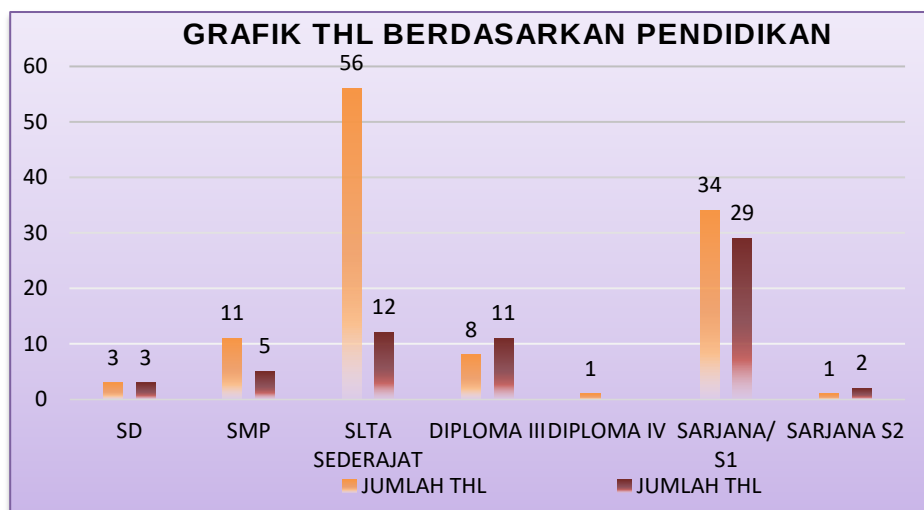
Tabel 1.1. Pegawai ASN Dan THL Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH ASN		JUMLAH
		LK	PR	
3	SMA	8	1	9
5	DIPLOMA III	9	11	20
8	SARJANA/ S1	35	35	70
9	SARJANA S2	12	8	20
TOTAL		64	55	119

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH THL		JUMLAH
		LK	PR	
1	SD	3	3	6
2	SMP	11	5	16
3	SLTA SEDERAJAT	56	12	68
6	DIPLOMA III	8	11	19
7	DIPLOMA IV	1		1
9	SARJANA/ S1	34	29	63
10	SARJANA S2	1	2	3
TOTAL		114	62	176



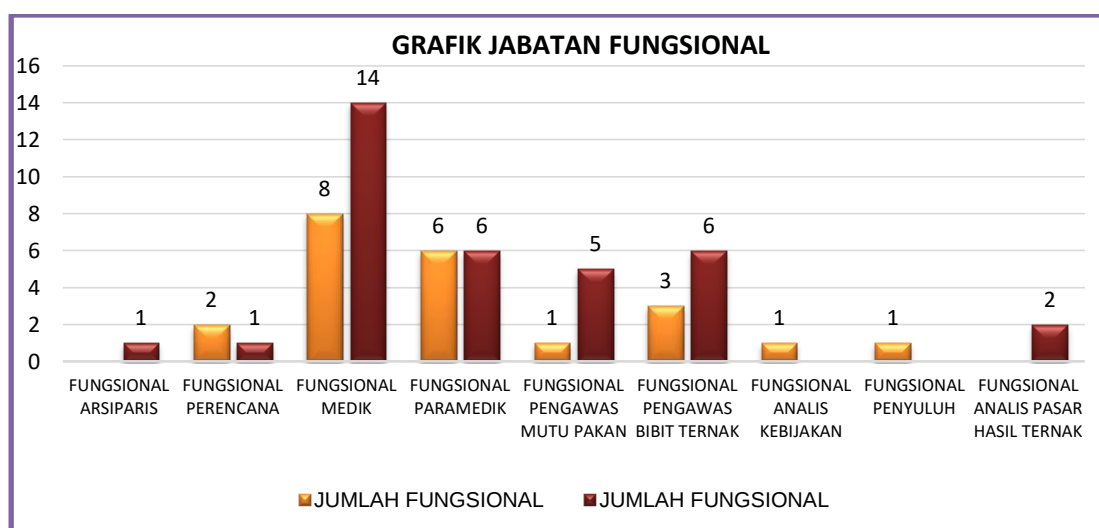
Gambar 1.3. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan



Gambar 1.4. Grafik Jumlah THL Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.2. Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023 (Orang)

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH FUNGSIONAL		JUMLAH
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	
1	FUNGSIONAL ARSIPARIS	0	1	1
2	FUNGSIONAL PERENCANA	2	1	3
3	FUNGSIONAL MEDIK	8	14	22
4	FUNGSIONAL PARAMEDIK	6	6	12
5	FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU PAKAN	1	5	6
6	FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK	3	6	9
7	FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN	1	0	1
8	FUNGSIONAL PENYULUH	1	0	1
9	FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL TERNAK	0	2	2
TOTAL		22	35	57



Gambar 1.5. Grafik Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu

1.4. Sarana dan Prasarana

Selain dukungan sumber daya aparatur, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga harus didukung oleh sumber daya aset/modal yang memadai. Kondisi aset/modal yang dimiliki saat ini disajikan sebagaimana tabel 1.3 berikut ini :

Tabel.1.3. Data Aset/Modal Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

No	Jenis Aset	Jumlah	Baik	Kondisi Rusak/Jelek
1	Gedung Kantor	5	5	
2	Gedung Kantor Lain	1	1	
3	Bangunan Gudang	9	6	2
4	Bangunan Gudang Instalansi	5	5	
5	Gedung Pemotong Hewan Permanen	2	2	
6	Aula	2	2	
7	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	23	12	11
8	Ruang Rapat	2	2	
9	Laboratorium	2	2	
10	Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	9	9	
11	Kendaraan Dinas Operasional Roda 4	11	6	5
12	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	27	27	
13	Kendaraan Roda 3	8	3	5
14	Holding Ground	1	1	
15	Kandang Sapi	16	13	3
16	Sapi Bull	27	17	10
17	Induk Sapi	81	81	
18	Komputer PC	108	99	9
19	Note Book	24	10	14
20	Mesin Fotocopy	3	3	

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024

1.5. Fungsi dan Tugas

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan tugas membantu Gubernur pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian sub urusan Peternakan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan kesekretariatan, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan;

- b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan, Bidang Produksi Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Bidang Agribisnis Peternakan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

A. Tugas dan Fungsi Sekretariat

- (1) Sekretariat menyelenggarakan tugas melakukan pelayanan administrasi terkait Perencanaan Progam, Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepegawaian dan Umum.
- (2) Untuk pelaksanaan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi

- keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris dibantu oleh Jabatan Pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Tugas dan Fungsi Bidang Produksi Peternakan

- (1) Bidang Produksi Peternakan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan budidaya Ternak, Perbibitan Ternak, Pakan Ternak, Teknologi reproduksi ternak, Pengembangan Kawasan Peternakan dan Sistem Integrasi Ternak Tanaman.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas, Bidang Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian, penyusunan, pengolahan data, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Produksi Peternakan;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang produksi peternakan;
 - c. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang produksi peternakan, antara lain meliputi budidaya ternak, perbibitan ternak, pakan ternak, teknologi reproduksi ternak, pengembangan kawasan peternakan dan sistem integrasi ternak tanaman serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang produksi peternakan, antara lain meliputi budidaya ternak, perbibitan ternak, pakan ternak, teknologi reproduksi ternak, pengembangan kawasan peternakan dan sistem integrasi ternak tanaman serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;

- e. pelaksanaan koordinasi, KIE (komunikasi, informasi, edukasi), fasilitasi, pengawasan, pemantauan pada Bidang Produksi Peternakan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Produksi Peternakan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Hewan

- (1) Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, kelembagaan, sumber daya kesehatan dan pengawasan obat hewan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengolahan data, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Kesehatan Hewan;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Kesehatan Hewan;
 - c. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan, antara lain meliputi pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, kelembagaan, sumber daya kesehatan dan pengawasan obat hewan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Hewan, antara lain meliputi pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, kelembagaan, sumber daya kesehatan dan pengawasan obat hewan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
 - e. pelaksanaan koordinasi, KIE (komunikasi, informasi, edukasi), fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan

- pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Kesehatan Hewan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan tugas yang terkait dengan hegiene sanitasi, pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :
- a.pengkajian, penyusunan, pengolahan data, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b.penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- c.pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, antara lain meliputi hegiene sanitasi, pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
- d.pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, antara lain meliputi hegiene sanitasi, pengawasan keamanan produk hewan, zoonosis dan kesejahteraan hewan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
- e.pelaksanaan koordinasi, KIE (komunikasi, informasi, edukasi), fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evalasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Tugas dan Fungsi Bidang Agribisnis

- (1) Bidang Agribisnis Peternakan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pengelolaan sumber daya dan kelembagaan peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pengembangan usaha peternakan, investasi dan penyuluhan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Agribisnis Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengolahan data, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang Agribisnis Peternakan;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Agribisnis Peternakan;
 - c. pelaksanaan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang agribisnis peternakan, antara lain meliputi pengelolaan sumber daya dan kelembagaan peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pengembangan usaha peternakan, investasi dan penyuluhan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang agribisnis peternakan, antara lain meliputi pengelolaan sumber daya dan kelembagaan peternakan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pengembangan usaha peternakan, investasi dan penyuluhan serta penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana;
 - e. pelaksanaan koordinasi, KIE (komunikasi, informasi, edukasi), fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Agribisnis Peternakan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Agribisnis Peternakan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Tugas dan Fungsi UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan

(1) UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium veteriner dan Klinik Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada subbagian Tata usaha, seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Laboratorium Veteriner dan Seksi Klinik Hewan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

G. Tugas dan Fungsi UPT. Inseminasi Buatan Ternak UPT Inseminasi Buatan Ternak

(1) UPT Inseminasi Buatan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Inseminasi Buatan Ternak.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Inseminasi Buatan Ternak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Perneliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan Pejantan Unggul dan Hijauan Pakan Ternak dan Seksi Produksi, Distribusi dan Pemasaran Semen Beku;

- d. penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Inseminasi Buatan Ternak; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

H. Tugas dan Fungsi UPT. Pengembangan Ternak dan Pakan

- (1). UPT Pengembangan Ternak dan Pakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Pengembangan Ternak dan Pakan.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengembangan Ternak dan Pakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada sub bagian Tata usaha seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Ternak dan Seksi Produksi dan Pengembangan Pakan Ternak;
 - d. penyelenggaraan pelayanan penyediaan ternak dan bibit dan atau benih hijauan pakan ternak dan pendampingan teknologi Laboratorium Pakan Ternak; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

1.6 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan. Untuk mendukung visi dan misi kepala daerah, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau berperan dalam

mendukung misi ke tiga yakni mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing dengan sasaran meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan Pendapatan dengan indikator Nilai PDRB ADHK.

Sub sektor peternakan telah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah secara langsung dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Disamping itu, kontribusi sub sektor peternakan yaitu pada penyediaan bahan pangan asal hewan dan bahan baku industri, serta ikut berperan dalam penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan riil masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan asal hewan yang di pengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akan kebutuhan gizi, maka Usaha peternakan berperan penting dalam penyediaan pangan protein hewani, terutama daging. Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Riau tidak hanya menjamin ketersediaan produksi hasil ternak tapi juga menjamin standar mutu produk hasil ternak yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Undang- undang No.41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bahwa semua pemotongan hewan ternak harus dilaksanakan di Rumah Potong Hewan. Hal ini untuk menjamin standar mutu aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) tersebut.

Dalam pemenuhan kebutuhan pangan asal hewan yang ASUH, perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak di Riau sesuai dengan potensi genetiknya, melalui pengembangan komoditas ternak unggul berbasis kawasan terutama kawasan integrasi sapi-sawit dengan mengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang ada.

1.7. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Organisasi

Perkembangan produksi dan produktivitas beberapa komoditas peternakan selama beberapa tahun terakhir masih lamban. Produksi daging terutama produksi daging ruminansia masih sangat kurang bila dibandingkan dengan kebutuhan daging dari tahun ke tahun yang semakin meningkat. Saat ini

pemenuhan kebutuhan daging ruminansia terutama sapi masih dominan didatangkan dari luar. Dari total produksi daging ruminansia di Provinsi Riau tahun 2024, produksi daging ruminansia lokal hanya sebesar 29%, selebihnya merupakan ternak yang didatangkan dari luar dan dipotong di Provinsi Riau. Dan untuk memenuhi kebutuhan daging ruminansia disamping daging segar juga dipenuhi dari daging beku yang didatangkan dari luar Provinsi Riau.

Rendahnya produksi daging ruminansia lokal di Provinsi Riau salah satunya dikarenakan jumlah populasi ternak yang masih sedikit. Peningkatan populasi ternak di Riau pada dasarnya masih relatif rendah perkembangannya. Hal tersebut terjadi disebabkan berbagai macam faktor seperti ketersediaan bibit ternak lokal yang masih sangat kurang, manajemen perkawinan belum optimal, penerapan teknologi tepat guna dilapangan masih minim, *Good Farming Practice* tidak diterapkan dengan baik, dan penataan kelembagaan peternakan belum optimal.

Komoditas peternakan dimana pelaku pemeliharaan ternak (produsen) sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah Sistem pemeliharaan didominasi oleh ekstensif maupun semi intensif dan hanya sebagian kecil yang intensif, menyebabkan produktivitas tidak optimal.

Hal lain yang menjadi permasalahan dalam pembangunan peternakan dan kesehatan hewan adalah upaya menekan penyakit ternak di Provinsi Riau, sampai saat ini masih merupakan persoalan yang masih dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Upaya pencegahan dengan vaksinasi, pemberantasan (eliminasi), pengawasan lalu lintas, sosialisasi dan koordinasi dilakukan untuk menekan penyebaran penyakit ternak, namun kasus penyakit ternak masih saja terjadi.

Tabel 1.4. Pemetaan Permasalahan Utama Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Riau

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertumbuhan produksi daging lambat	Pertambahan populasi ternak lambat	Angka Kelahiran IB rendah Angka Kelahiran INKA rendah Jumlah bibit ternak terbatas

				Kualitas bibit ternak tidak unggul
				Kurang pakan berkualitas
				Terbatasnya modal usaha
				Akses permodalan usaha peternakan yang masih sulit bagi peternak
				Peternak belum berorientasi bisnis
				Terbatasnya anggaran untuk penyediaan prasarana
				Petugas pelayanan reproduksi belum terlatih
				Pengetahuan dan keterampilan Petugas Lapangan Teknis terbatas
				Minimnya pengetahuan peternak tentang teknik budidaya ternak
				Terbatasnya kemampuan peternak dalam mengelola kelembagaan petani
2	Ancaman kematian ternak	Pengendalian penyakit hewan menular belum optimal		Penyakit hewan belum terpantau dengan baik
				Pelayanan veteriner belum maksimal
				Minimnya sarana prasarana Puskesmas
3	Belum semua produk Pangan Asal Hewan yang ASUH	Pengawasan pangan asal ternak ASUH belum optimal		Pelaksanaan Audit/Surveillance /Identifikasi NKV dan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan masih terbatas
				Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM kesmavet
				Pengawasan peredaran pangan Asal Hewan belum optimal

1.8. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Nomor 241/LHE/INSP-RIAU/Ir.IIINI/2024 Tanggal 28 Juni 2024 atas evaluasi tahun 2023 mendapatkan nilai 75,25 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik” yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

No	Komponen	Bobot	Nilai 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,10
2.	Pengukuran Kinerja	30	16,80
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,60
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,75
	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	75,25
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Hasil evaluasi AKIP pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau merekomendasikan bahwa dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, agar Pengukuran Kinerja dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dan Pimpinan terlibat dalam pengambilan Keputusan dalam mengukur capaian kinerja.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN SAKIP	CATATAN LHE SAKIP	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	PENGUKURAN KINERJA	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau telah menginput capaian kinerja pada aplikasi SIAPADIA sebagai salah satu alat yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja berkala oleh Perangkat Daerah. Namun dalam Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian Strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.	Pengukuran Kinerja dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dan Pimpinan terlibat dalam pengambilan keputusan dalam mengukur capaian kinerja.	- Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>Punishment</i> diantaranya : - Dalam hal disiplin pegawai, pimpinan memberi surat teguran bagi pegawai yang tidak hadir pada apel pagi. - Memberi surat teguran kepada PPTK terkait target realisasi fisik dan keuangan yang tidak sesuai dengan target. - Dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melaksanakan kebijakan penyesuaian target kinerja. Pada indikator yang capaian kinerjanya sudah tercapai atau terlampaui maka target tahun berikutnya disesuaikan dengan meningkatkan targetnya. Sedangkan pada target kinerja yang capaiannya jauh dari target karena anggaran dikurangi maka kegiatan yang dilaksanakan adalah yang benar-benar fokus untuk capaian kinerja dan/atau menyesuaikan target dengan mengurangi target sesuai dengan anggaran yang tersedia - Kepala Dinas mengadakan rapat setiap bulan terkait capaian kinerja dan

				membahas tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan kegiatan dengan seluruh Pejabat administrator dan seluruh Ketua Tim Kerja Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
--	--	--	--	---

1.9. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 berpedoman pada PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Aspek Strategis Organisasi, Permasalahan Utama Organisasi dan Sistematika Penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

Bab II berisi :

1. Rencana Strategis Dinas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau
2. Perjanjian Kinerja
3. Rencana Anggaran 2021
4. Instrumen Pendukung

2.1. Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disamping berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau juga harus memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Renstra Dinas kabupaten/kota yang menangani bidang peternakan, serta memperhatikan hasil evaluasi Kinerja Dinas Peternakan dan Kesejahteraan Hewan tahun-tahun sebelumnya, serta dengan memperhatikan isu-isu dan faktor-faktor strategis bidang peternakan, baik pada tingkat global, nasional maupun regional.

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2019-2024 merupakan acuan untuk melakukan pengukuran kinerja. Rencana Strategis yang disusun berangkat dari permasalahan Pokok Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang dirasakan pada tahun-tahun sebelumnya.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau periode 2019-2024, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau mempunyai peran dalam mencapai sasaran dari Misi ke 3 Kepala Daerah yakni pada misi Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing. Dalam upaya pencapaian misi tersebut, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan tujuan dinas yakni **Memperkuat peran sub sektor peternakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat**. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran berfokus pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi dan harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Dalam Dokumen Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Utama sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
1	Memperkuat Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)
		Terjaminnya Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status kesehatan hewan (%)
			Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)

2.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan 2 (dua) indikator sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas, dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 telah dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024

VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)			
MISI 3 : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing			
Tujuan : Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing			
Tujuan PD	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memperkuat peran sub sektor peternakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	1.Meningkatnya produksi daging	Peningkatan populasi ternak	- Peningkatan Kelahiran - Penyediaan Pakan Berkualitas - Penyediaan Bibit ternak berkualitas - Penyediaan indukan dan pejantan berkualitas
		Pengembangan SDM dan kelembagaan peternak	- Pembinaan dan Penyuluhan kepada Kelompok Peternak - Memfasilitasi permodalan kelembagaan peternak

		dan pelaku usaha peternakan
	Peningkatan prasarana peternakan	- Menyediakan prasarana produksi peternakan - Menyediakan prasarana UPT
2. Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Penurunan angka kematian hewan	- Peningkatan Pelayanan Veteriner - Pengamatan penyakit hewan - Pengawasan Peredaran Obat Hewan - Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan - Pembinaan kelembagaan keswan
	2. Peningkatan jumlah unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan penjaminan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk	- Melaksanakan Audit/Surveillance /Identifikasi NKV dan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan - Meningkatkan Kompetensi Petugas Pelaksana Kesmavet

2.1.3. Program Kegiatan

Rencana Program Kegiatan, dan indikator kinerja, sasaran kinerja serta pagu pendanaan indikatif pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam lima Tahun (periode 2019-2024) sudah disusun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan Indikator Kinerja Program Utama dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Program SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024

	<i>PROGRAM</i>	<i>INDIKATOR KINERJA PROGRAM</i>
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan populasi ternak
2	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok yang membentuk korporasi
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	- Persentase angka kematian ternak - Persentase peningkatan unit usaha penyedia produk hewan yang menerapkan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	- Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran

Program Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada DPA Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Program prioritas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri 4 program yaitu :

- a) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- d) Program Penyuluhan Pertanian

2) Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
- b) Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
- c) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi
- d) Penyediaan Benih/Bibit dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
- e) Penataan Prasarana Pertanian

- f) Penjaminan Kesehatan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - g) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
 - h) Sertifikasi Persyaratan Terknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - i) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
 - j) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
- 3) Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebanyak 1 program dengan 4 kegiatan, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Kegiatan :
- a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Selain itu, Dinas Peternakan Provinsi Riau juga mendapatkan dana yang bersumber dari APBN dalam bentuk Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta Program Dukungan Manajemen.

2.2. Perjanjian Kinerja

Menurut PERMENPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 (Lampiran I), bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target

kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk Tahun 2024 Perjanjian Kinerja Utama yang dimaksud memuat 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator sasaran strategis yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)	80.632 Ton
2	Terjaminnya Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase status kesehatan hewan (%)	98%
		Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	5%
3	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Nilai SAKIP	78 (BB)

Pada tahun 2024, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga menyepakati Perjanjian Kinerja dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan 11 indikator kinerja kegiatan (Terlampir). Indikator dalam Perjanjian Kinerja tersebut juga mendukung tercapainya IKU Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

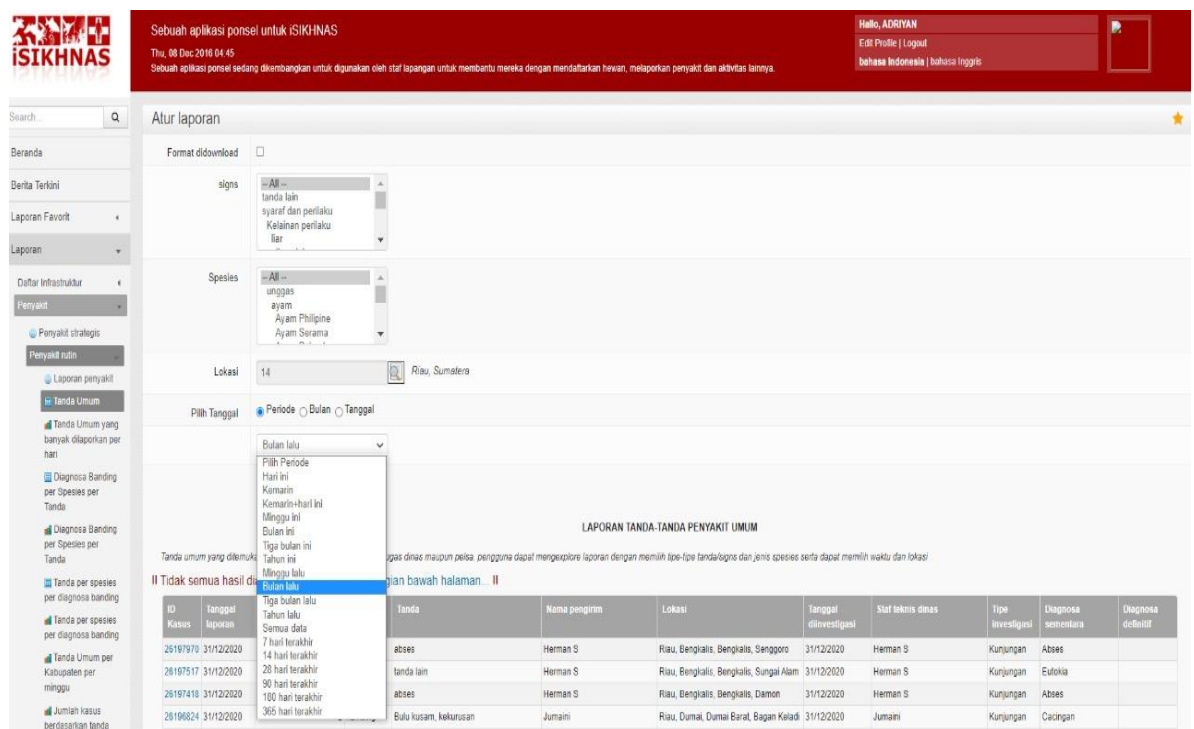
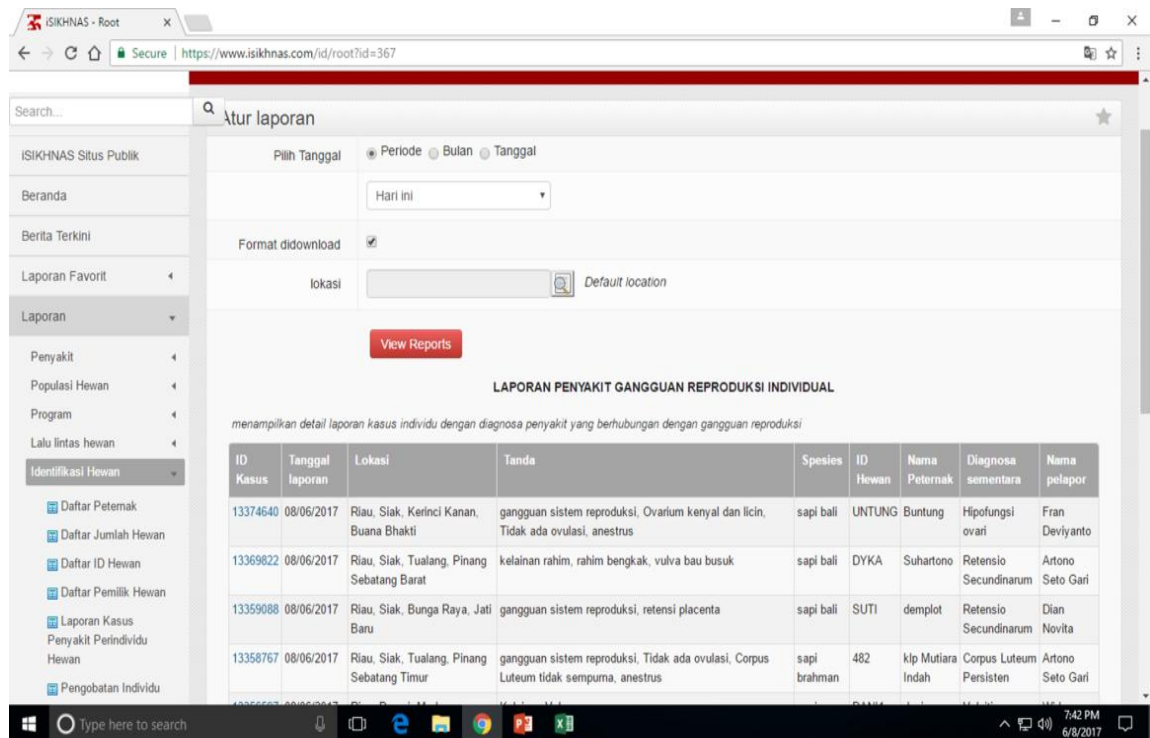
Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 62.577.464.408,- melalui mekanisme perubahan APBD 2024 menjadi Rp 60.837.771.766,-. Sedangkan pelaksanaan anggaran yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2024 Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebesar 12.153.179.000,- dan mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 2.415.734.000,-.

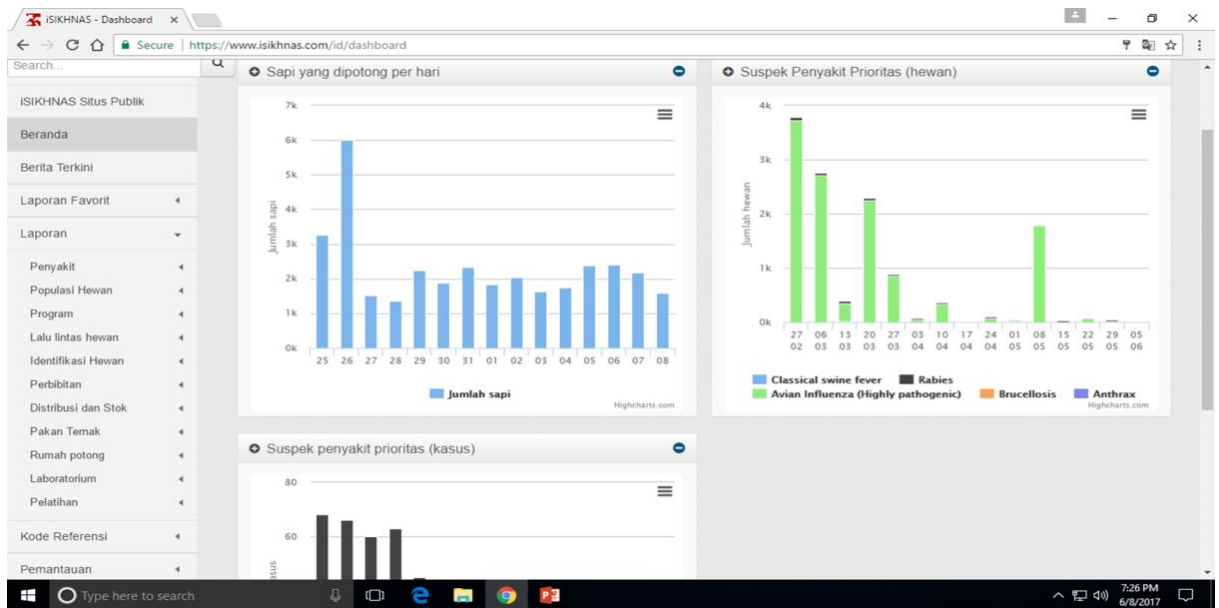
2.4. Instrumen Pendukung

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau didukung beberapa instrumen, yaitu dengan pengembangan aplikasi iSIKHNAS. iSIKHNAS adalah sistem informasi kesehatan hewan Indonesia yang mutakhir. Sistem ini menggunakan teknologi sehari-hari dalam cara yang sederhana namun cerdas untuk mengumpulkan data dari Petugas lapangan dan dengan segera menyediakannya bagi para pemangku kepentingan dalam bentuk yang bermakna dan dapat segera dimanfaatkan. iSIKHNAS menggunakan pesan SMS dari telepon genggam Petugas Lapangan yang melaporkan sewaktu selesai melakukan pelayanan dalam bentuk pengamatan, pengobatan, pelayanan inseminasi Buatan, Pemeriksaan kebuntingan, pelaporan kelahiran dan lain-lain. Data yang sudah dikirim dari HP Petugas Lapangan masuk ke system aplikasi iSIKHNAS dan membuat data dapat dilihat dan dianalisis dengan cara-cara yang mudah bagi pengguna untuk siapa pun yang memerlukannya. Sistem akan memastikan bahwa data dimasukkan secara akurat, laporan dikirimkan secara otomatis, dan terdapat akses yang mudah kepada data, analisis rutin yang terprogram, dan, yang sangat penting, sistem peringatan bagi staf yang perlu merespon laporan penyakit. iSIKHNAS akan memadukan beberapa sistem pengelolaan informasi, guna membuat berbagai sistem tersebut lebih efisien dan terjangkau bagi lebih banyak pengguna.

Dengan menggunakan iSIKHNAS, dapat menghubungkan data laboratorium dengan laporan penyakit, peta dengan data lalu-lintas hewan atau laporan wabah, data rumah potong dengan data produksi dan populasi, dan semua ini dilakukan secara otomatis. Hal ini sangat membantu para pengambil kebijakan di berbagai tingkat, juga baik bagi semua orang yang bekerja dalam bidang kesehatan hewan.



Gambar 2.2. Tampilan aplikasi iSIKHNAS



Gambar 2.3. Tampilan iSHIKHNAS di layar komputer

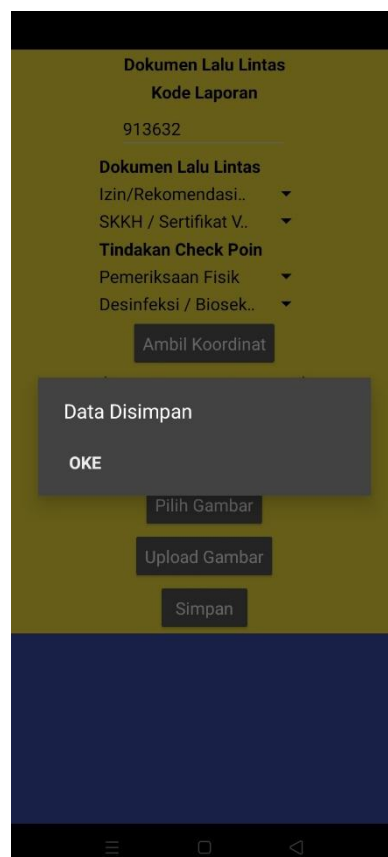
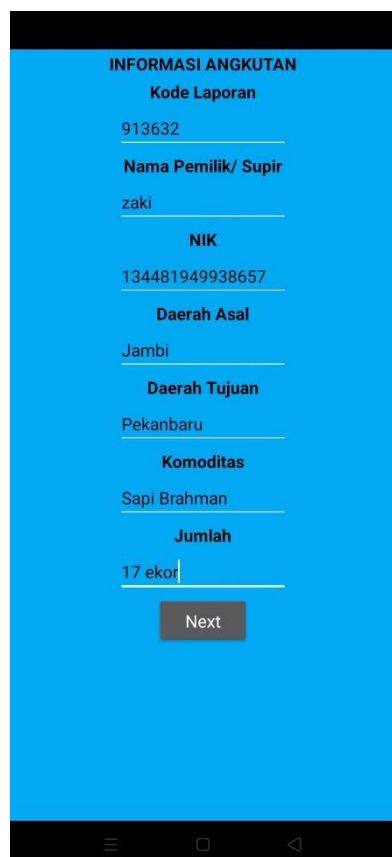
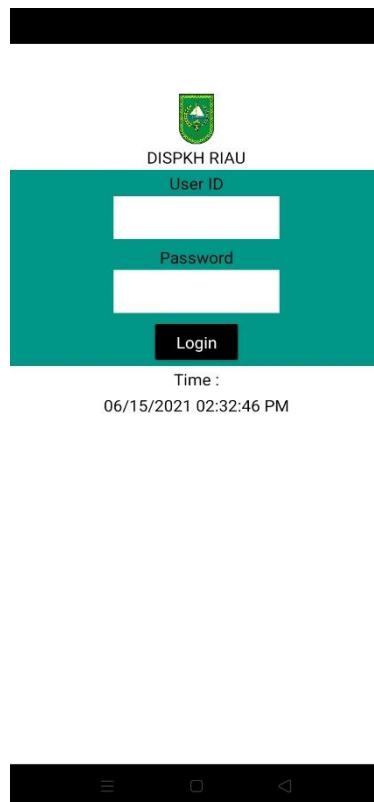
Posisi Provinsi Riau yang strategis serta lalu lintas barang dan orang yang semakin ramai menyebabkan rawan terhadap masuknya penyakit hewan menular maupun eksotik. Permasalahan utama dalam pengendalian penyakit ternak/hewan adalah karena kurang terpantaunya lalu lintas ternak dari daerah/provinsi lain sehingga resiko masuknya penyakit hewan menular maupun eksotik dari daerah/provinsi lain semakin besar. Tingginya lalu lintas hewan dan produk hewan masuk dan keluar ke Provinsi Riau membutuhkan pengawasan di titik-titik perbatasan dengan Provinsi luar. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau memiliki 5 pos check point di 5 titik yang berbatasan langsung dengan Provinsi tetangga, yang terletak di kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Kampar. Petugas check point melakukan pelaporan manual, yang dikirimkan setiap bulannya.

Untuk mempermudah pelaporan lalulintas ternak, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mulai mengembangkan aplikasi “SIPELANDUK” (**S**istem **P**engawasan **L**alu Lintas hewa**N** dan Pro**D**UK Hewan). Data dapat dilakukan secara elektronik melalui input di aplikasi SIPELANDUK di handphone petugas check point, sehingga pelaporan dapat dilakukan secara real time.

Sistem ini mempermudah pengawasan bagi koordinator check point terhadap kinerja petugas check point, karena setiap melakukan input data dapat terlihat titik

koordinat GPS. Disamping itu data yang diinput akan otomatis tersimpan di database Provinsi, dan dapat diakses rekapitulasinya oleh kabupaten.

TAMPILAN APLIKASI SIPELANDUK



Informasi yang akurat dan mudah serta cepat untuk diakses sangat penting untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam penyampaian informasi kepada masyarakat telah menggunakan berbagai media informasi untuk mendukung dinamika kelembagaan, seperti brosur, leaflet, bulletin, ekspose dan media massa lainnya. Tetapi dalam perkembangannya, penggunaan berbagai media tersebut dipandang masih kurang dikarenakan semakin tidak terbatasnya ruang dan waktu untuk mewadahi perkembangan informasi tersebut.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga mengelola website, yaitu : <http://dispkh.riau.go.id>. Pembuatan website ini adalah merupakan suatu upaya untuk menjembatani informasi yang semakin tidak terbatas serta untuk menuju penerapan E-Government pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, yaitu sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang *E-Government*, yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Secara umum website tersebut memiliki fungsi untuk memberikan informasi dinas seperti profil dinas, informasi dinas, data statistik pertanian, teknologi pertanian, kebijakan pertanian serta update harga pasar.

Hadirnya *website* ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan layanan masyarakat Riau khususnya masyarakat peternak dan pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan peternakan. Informasi yang disediakan oleh dinas di dalam website bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja dibutuhkan. Demikian pula sebaliknya, masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif untuk memberikan ide, masukan atau aduan untuk meningkatkan kualitas pembangunan peternakan di Riau.

TAMPILAN WEB DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

https://dispkh.riau.go.id



HOME PROFIL ▾ BIDANG ▾ UPT ▾ PPID ONLINE ▾ ARTIKEL PELAYANAN PUBLIK ▾ INFORMASI DINAS KOTAK PENGADUAN



https://dispkh.riau.go.id

HOME PROFIL ▾ BIDANG ▾ UPT ▾ PPID ONLINE ▾ ARTIKEL PELAYANAN PUBLIK ▾ INFORMASI DINAS KOTAK PENGADUAN

Sekapur Sirih

Tampil Semua



DRS. HERI AFRIZON, M.SI

Selamat datang di Website Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau ...

Selengkapny

Harga Komoditas

Daging Ayam	38.228/Kg
Daging sapi	140.238/Kg



Kajian Bulanan Bersama Ustadz Bachtar Khalifa Di Musholla Al Fitrah, DPKH Provinsi Riau

Acara Penggunaan Aplikasi E-Kinerja BKN Tahun 2025

10 Februari 2025 Berita

Senin, 10 Februari 2025, PIt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Bapak Drs. H. Heri Afrizon, M.Si memberikan kata sambutan dal...

Rapat Pembahasan Tugas Dan Fungsi (Tusi) UPT PTP

03 Februari 2025 Berita

Senin, 3 Februari 2025 PIt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Riau, Drs. H. Heri Afrizon, M.Si, memimpin rapat...

Monitoring Pelaksanaan Vaksinasi Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK)

24 Januari 2025 Berita

Kamis, 23 Januari 2025 PIt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Drs. H. Heri Afrizon, M.Si, bersama Direktur Ke...



Rapat Konsultasi Dan Koordinasi Bersama Komisi II DPRD Kabupaten Rokan Hulu

Pertemuan Sosialisasi R-Inpres Pendayagunaan Penyuluh Pertanian

04 Februari 2025 Berita

PIt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Drs. H. Heri Afrizon, M.Si, Menghadiri pencaarahan lanasuna dari Wakil Menteri Pertanian...

Rapat Rancangan Pelaksanaan Program Strategis Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tahun 2025-2029

25 Januari 2025 Berita

Jumat, 24 Januari 2025 PIt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Drs. H. Heri Afrizon, M.Si,

Rapat Koordinasi Penanggulangan Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) Se-Propinsi Riau

24 Januari 2025 Berita

Kamis, 23 Januari 2025 PIt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Drs. H. Heri Afrizon, M.Si, memimpin Rapat Koord...

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III berisi :

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

A. Capaian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. Akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dengan Gubernur Riau. Penilaian terhadap perjanjian kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan program dan kegiatan dengan mengevaluasi dan mengukur kinerja. Ukuran kinerja dilakukan dengan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan evaluasi. hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

- (2) Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja mencakup :

- Realisasi kinerja sasaran yang merupakan tingkat capaian dari masing-masing sasaran indikator kinerja
- Persentase pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian dari target masing-masing indikator kinerja.

Dengan penjelasan persentase pencapaian kinerja sebagai berikut :

- (1). Untuk indikator produksi daging, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.
- (2). Pada indikator persentase status Kesehatan hewan, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik.
- (3). Pada indikator persentase produk asal hewan yang ASUH, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik.



SASARAN I MENINGKATNYA PRODUKSI DAGING

Untuk mengukur Sasaran Strategis I yakni meningkatnya produksi daging digunakan indikator Produksi daging. Pada indikator kinerja produksi daging dihitung dari penghitungan jumlah pemotongan ternak (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam Ras Pedaging, dan Ayam Buras) dikalikan dengan parameter berat karkas masing-masing ternak tersebut.

Produksi daging adalah karkas hasil pemotongan ternak diwilayah tersebut ditambah dengan bagian yang dapat dimakan (edible portion) selama waktu

tertentu. Produksi daging menunjukkan jumlah daging yang diproduksi pada tahun ke-t.

$$PD = K0 \times St$$

Keterangan:

PD = Produksi Daging

K0 = Berat karkas

St = Jumlah pemotongan ternak (tercatat dan tidak tercatat) pada tahun t

1. Realisasi Produksi Daging Tahun 2024, Perbandingan Dengan Realisasi Tahun Lalu Serta Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra

Capaian sasaran Meningkatnya Produksi daging dengan Indikator Produksi Daging Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.2. Capaian Sasaran Strategis dengan Indikator Produksi Daging Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI PENILAIAN
1	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)	80.632 Ton	84.615 Ton*	104,94%	Sangat Tinggi

*Angka Sementara

Realisasi dan Tingkat Capaian Produksi Daging



Dari Gambar 3.2 dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2024 untuk sasaran strategis I : Meningkatnya produksi daging dengan indikator Produksi Daging terlihat bahwa capaiannya melebihi target.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, target produksi daging sebesar 80.632 Ton, dan realisasi produksi daging angka sementara sebesar 84.615 Ton dengan tingkat capaian 104,94%.

Realisasi tahun 2024 tidak terlepas dari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Membandingkan realisasi saat ini dengan tahun sebelumnya berguna untuk melihat pertumbuhan capaian dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2023) dapat dilihat bahwa produksi daging tahun 2024 meningkat 5,4%, dimana pada tahun 2023 produksi daging sebanyak 80.276 Ton.

Tabel. 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Produksi Daging Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun Tahun Sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023			2024		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)	59,912 Ton	65,408 Ton	109,17%	61,096 Ton	77,730 Ton	127,23%	75.514 Ton	80.276 Ton	106,30%	80.632 Ton	84.615 Ton*	104,94%

Dari Tabel.3.3 dapat dilihat bahwa produksi daging meningkat setiap tahunnya dengan tingkat capaian melebihi 100%. Tahun 2023 dan tahun 2024 persentase capaian kinerjanya lebih kecil dibanding persentase capaian kinerja tahun 2022 walaupun produksinya lebih tinggi dikarenakan pada perjanjian kinerja tahun 2023 dan 2024 targetnya sudah dinaikkan dari target renstra karena target renstra sudah tercapai bahkan melebihi target.

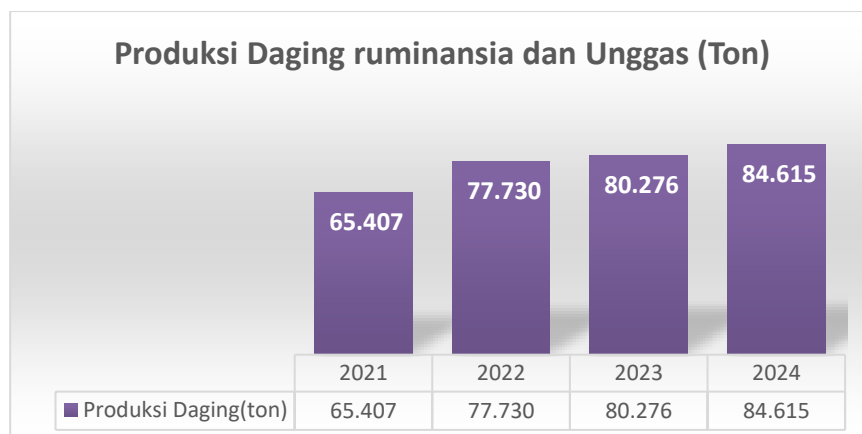
Untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian target renstra, maka dilakukan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2024 dengan target akhir renstra yakni target sampai dengan tahun 2024.

Tabel.3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

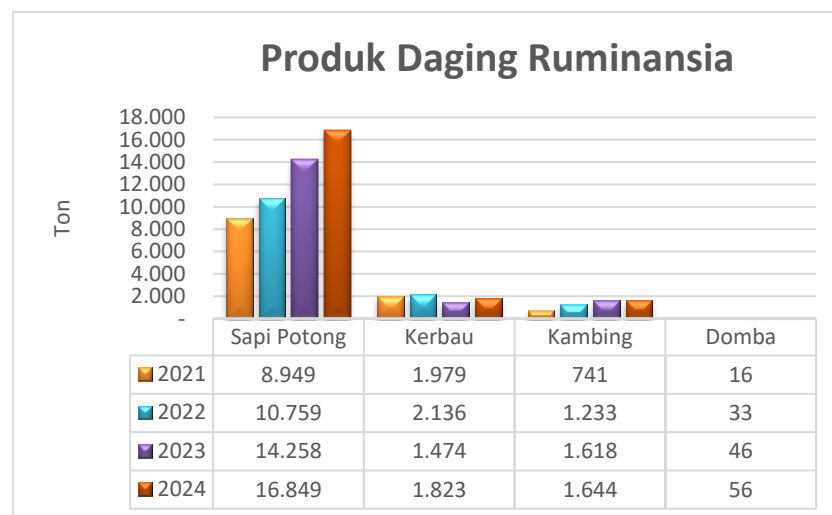
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir Renstra	Realisasi s.d.Tahun 2024	Capaian Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra
1	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)	246.846 Ton	308.030 Ton	124,79%

Pada Renstra Perubahan Tahun 2029-2024 target akhir produksi daging sebanyak 246.846 Ton, sehingga bila dibandingkan dengan realisasi produksi daging sampai dengan tahun 2024 sebanyak 308.030 Ton, maka capaian target sudah tercapai malah sudah melebihi target dengan tingkat capaiannya 124,79%.

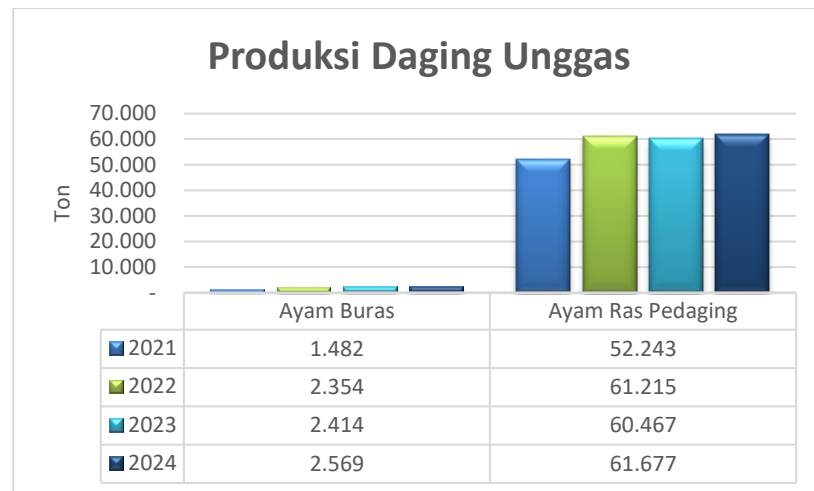
Untuk melihat perkembangan produksi daging per komoditas setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.1. Grafik Produksi Daging Tahun 2021-2024



Gambar 3.2. Grafik Produksi Ruminansia Tahun 2021-2024



Gambar 3.3. Grafik Produksi Daging Unggas Tahun 2021-2024

Pada gambar 3.1, gambar 3.2, dan gambar 3.3 terlihat adanya peningkatan produksi daging dari tahun 2021 hingga 2024. Produksi daging sangat dipengaruhi oleh kebutuhan konsumsi atau permintaan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan daging meningkat setiap tahunnya sebagai akibat dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada peningkatan gizi. Pangan asal ternak sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan, kesehatan dan kecerdasan masyarakat Indonesia. Permintaan pangan asal ternak saat ini cenderung terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi masyarakat, perbaikan tingkat pendidikan, peningkatan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi protein hewani serta perubahan gaya hidup sebagai akibat arus globalisasi dan urbanisasi.

2. Analisis Capaian Kinerja/Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi daging selama beberapa tahun terakhir. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi daging diantaranya adalah dengan peningkatan populasi ternak. Peningkatan populasi ternak dilakukan melalui optimalisasi reproduksi (Inseminasi Buatan dan Kawin alam) dan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat. Peningkatan populasi

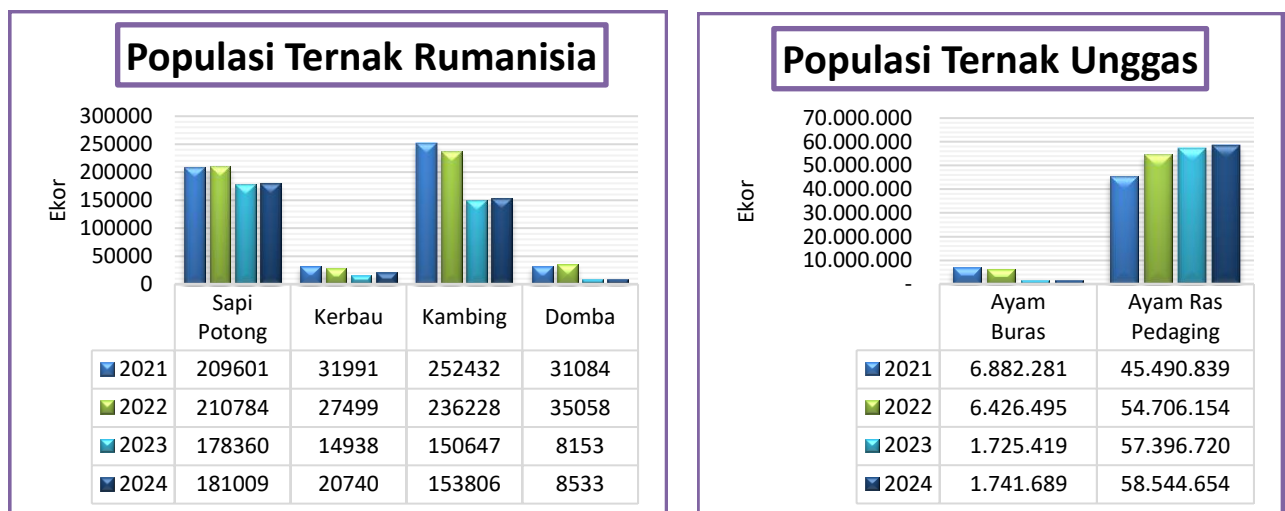
juga didukung oleh ketersediaan Pakan Ternak baik itu Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang berkualitas maupun juga Pakan Olahan.

Dari hasil upaya peningkatan populasi dapat diuraikan jumlah populasi pada tabel dan gambar gambar berikut:

Tabel.3.5. Populasi Ternak

Jenis Ternak	Jumlah Populasi Ternak (Ekor)			
	2021	2022	2023	2024
Sapi Potong	209.601	210.784	178.360	181.009
Kerbau	1.991	27.499	14.938	20.740
Kambing	52.432	236.228	150.647	153.806
Domba	1.084	35.058	8.153	8.533
Ayam Buras	6.882.281	6.426.495	1.725.419	1.741.689
Ayam Ras Pedaging	45.490.839	54.706.154	57.396.720	58.544.654

*Angka Sementara



Gambar 3.4. Grafik Populasi Ternak Ruminasia dan Unggas

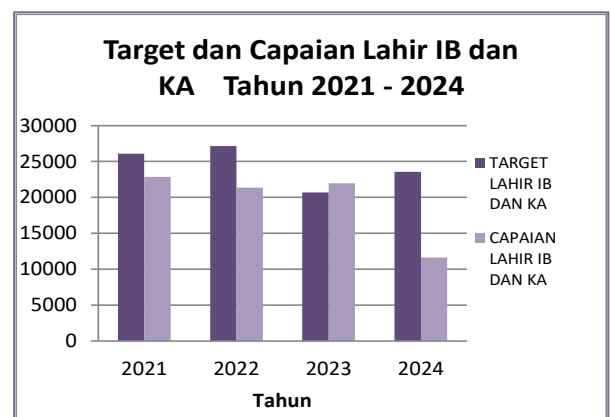
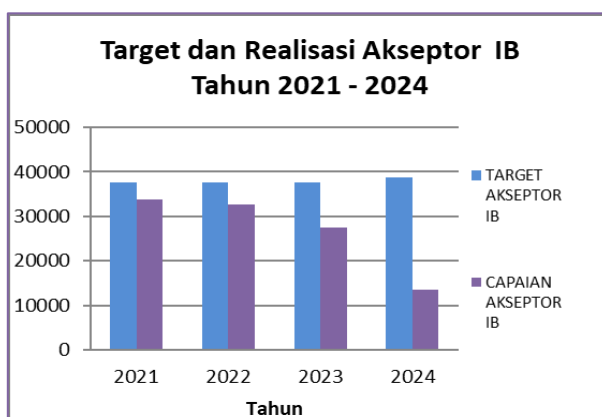
Dari gambar 3.4. dapat dilihat populasi ternak mengalami fluktuasi. Ternak ruminasia sapi, kambing dan domba tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan, namun tahun 2023 populasi ternak ruminansia mengalami penurunan. Populasi ternak tahun 2023 berdasarkan data hasil Sensus Pertanian 2023 yang menghitung pada posisi 1 mei 2023. Penurunan populasi ternak ruminansia tahun 2023 terjadi karena pada tahun 2022 terjadi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyebabkan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Dan Produk Hewan

Rentan Penyakit Mulut Dan Kuku Berbasis Kewilayahan dan SK Gubernur Riau Nomor : Kpts.1088/VII/2022 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Akibat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Disease*) di Provinsi Riau yang membatasi hewan dan produk hewan keluar/masuk dari provinsi lain. Sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan daging Provinsi Riau lebih banyak mendatangkan ternak untuk dipotong dari provinsi lain. Ternak yang ada di Riau hanya sebagian kecil yang dipotong sekitar 20% dari pemenuhan butuhan daging, selebihnya pemenuhan daging berasal dari ternak yang didatangkan dari provinsi lain. Namun dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut, ternak dari luar provinsi sangat susah masuk sehingga untuk memenuhi kebutuhan daging, ternak milik Masyarakat di Riau yang banyak dijual dan dipotong sehingga populasi ternak tahun 2023 di Riau menjadi jauh berkurang.

Upaya peningkatan populasi dan produksi daging ruminansia terutama sapi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau menetapkan target kelahiran melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi kawin alam (Inka).

Tabel 3.6. Target dan Realisasi Inseminasi Buatan (IB) dan Kelahiran

TAHUN	TARGET AKSEPTOR IB (EKOR)	REALISASI AKSEPTOR IB (EKOR)	TINGKAT CAPAIAN %	TARGET LAHIR IB DAN KA	CAPAIAN KELAHIRAN		REALISASI LAHIR (EKOR)	TINGKAT CAPAIAN %
					IB	KAWIN ALAM		
2021	37.550	33.732	90	26.065	16.752	6.107	22.859	88
2022	37.550	32.711	87	27.143	16.102	5.253	21.355	79
2023	37.550	27.446	73	20.700	16.195	5.756	21.951	106
2024	38.800	13.551	35	23.569	8.887	2.738	11.625	49



Gambar 3.5. Target dan Realisasi Inseminasi Buatan dan Kelahiran

Target Inseminasi Buatan setiap tahun mengalami peningkatan, namun

realisasinya mengalami penurunan. Realisasi Akseptor IB tahun 2021 sebanyak 33.732 ekor atau 90% dari yang ditargetkan. Namun capaian IB setiap tahun mengalami penurunan dan pada tahun 2024 realisasi IB hanya 13.551 ekor dari 38.800 ekor dengan tingkat capaian hanya 35% dari yang di targetkan.

Tidak tercapainya target IB tahun 2021 disebabkan karena terjadinya Wabah Penyakit LSD dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Petugas tidak bisa dengan bebas melakukan aktifitas dilapangan karena khawatir akan menjadi media penularan penyakit pada ternak. Selain itu juga, untuk mengatasi terjadinya penularan penyakit maka dilakukan kegiatan vaksinasi pada ternak dengan mengerahkan seluruh petugas lapangan termasuk juga petugas inseminator IB sehingga aktivitas pelayanan IB juga terkendala. Untuk Tahun 2022, dilaksanakan kegiatan Penandaan dan Pendataan Ternak dengan target seluruh populasi sapi dan kerbau harus didata dan ditandai dengan menggunakan *eartag* sehingga pelayan IB juga menjadi berkurang karena yang bisa dilayani IB hanya ternak yang sudah dilakukan penandaan atau sudah diberi *eartag*. Pada tahun 2023, kegiatan penandaan masih dilanjutkan untuk ternak-ternak yang belum di tandai pada tahun 2022. Pada tahun 2023 sudah dilakukan pembatasan pelaporan pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) di isikhnas, pelaporan IB hanya dapat dilakukan dengan melengkapi data identitas ternak nasional *Eartag Secure QR Code* atau mengupdate data identitas ternak yang terdapat pada *Eartag Secure QR Code* ini juga salah satu penyebab tidak tercapainya target pelaksanaan IB, sedangkan pada tahun 2024, pelaporan hanya bisa melalui Identik PKH sehingga IB yang dilaporkan semakin sedikit.

Pelaporan kelahiran tahun 2021 sampai dengan 2024 hasilnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 pelaporan kelahiran hanya tercapai 88 % dari target yaitu 22.859 ekor dari 26.065 ekor yang ditargetkan. Pada tahun 2022, pelaporan kelahiran hanya tercapai 79 % yaitu 21,355 ekor dari target 27.413 ekor. Pada tahun 2023 tercapai 79% yaitu 21.591 ekor dari target 27.613 ekor. Tahun 2024 realisasi kelahiran hanya 11.625 ekor dari 32.532 ekor yang ditargetkan dengan tingkat capaiannya hanya 36%.

Rincian capaian kegiatan Inseminasi Buatan (IB) pada tahun 2024 adalah seperti tabel 3.7.

Tabel 3.7. Target dan Realisasi IB tahun 2024

No	Kabupaten	Target Akseptor (ekor)	Realisasi (ekor)	Capaian (%)
1	Kuatan Singingi	6400	2463	38
2	Indragiri Hulu	6800	2105	31
3	Indragiri Hilir	1100	124	11
4	Pelalawan	1600	124	8
5	Siak	3100	1472	47
6	Kampar	7200	3513	49
7	Rokan Hulu	6600	2411	37
8	Rokan Hilir	1600	347	22
9	Bengkalis	2400	701	29
10	Kep. Meranti	250	36	14
11	Pekanbaru	150	3	2
12	Dumai	1600	252	16
	Total	38800	13551	35

Berdasarkan potensi betina produktif di Provinsi Riau sebagai dasar untuk menetapkan target Inseminasi Buatan (IB), Provinsi Riau mempunyai potensi betina produktif tahun 2024 sebanyak 58.000 ekor. Perbandingan potensi akseptor Inseminasi Buatan (IB) dengan target yang ditetapkan masih banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan akseptor pelaksanaan IB. Target akseptor yang sudah ditetapkan untuk tahun 2024 dibawah potensi akseptor, akan tetapi dalam pelaksanaan pelayanan IB tahun 2024 tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah petugas IB dan luasnya jangkauan pelayanan IB serta medan yang cukup berat sehingga dalam sehari hanya bisa melayani ternak 1 atau 2 ekor saja. Selain itu cara pemeliharaan ternak di Provinsi Riau masih semi intensif bahkan di beberapa kabupaten dan kecamatan tertentu pola pemeliharaan secara ekstensif dimana pola pemeliharaan tersebut sangat mempengaruhi capaian IB. Untuk pemeliharaan secara ekstensif peternak tidak dapat melihat tanda-tanda berahi dan terjadi kawin secara alami oleh pejantan. Kurang tertibnya petugas dalam menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan juga mempengaruhi capaian

kinerja IB dilapangan. Kegiatan IB tetap berjalan, namun karena tidak adanya pelaporan maka kinerja IB menjadi rendah.

Pembatasan pelaporan pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) di isikhnas Dimana pelaporan IB hanya dapat dilakukan dengan melengkapi data identitas ternak nasional Eartag Secure QR Code atau mengupdate data identitas ternak yang terdapat pada Eartag Secure QR Code ini juga salah satu penyebab tidak tercapainya target pelaksanaan IB.

Sebagian petugas masih melakukan pelaporan melalui Isikhnas. Namun ternyata data dari Isikhnas hanya bisa didownload sampai bulan Oktober 2024. Karena petugas masih banyak yang tidak melaporkan melalui Identik PKH, sehingga menyebabkan pelaporan kegiatan IB dan pelaporan kelahiran tidak maksimal dilaksanakan, sehingga capaian IB dan kelahiran terlihat rendah.

Tabel .3.8. Target dan realisasi Kelahiran Tahun 2024 pada 12 Kabupaten/kota

No	Kabupaten	Target Lahir (ekor)	Realisasi Kelahiran(ekor)		Total Kelahiran (ekor)	Capaian (%)
			Inseminasi Buatan (IB)	Kawin Alam (KA)		
1	Kuatan Singingi	5.238	1.578	335	1913	37
2	Indragiri Hulu	6.042	1.498	469	1967	33
3	Indragiri Hilir	820	51	125	176	21
4	Pelalawan	1.386	78	56	134	10
5	Siak	3.019	989	268	1257	42
6	Kampar	5.614	2.721	458	3.179	57
7	Rokan Hulu	5.018	1.400	573	1.973	39
8	Rokan Hilir	1.563	206	71	277	18
9	Bengkalis	2.154	253	193	446	21
10	Kep. Meranti	311	25	16	41	13
11	Pekanbaru	239	0	5	5	2
12	Dumai	1.128	88	169	257	23
	Total	32.532	8.887	2.738	11.625	36

Penyebab lain rendahnya pelaporan kelahiran dan tidak real timenya pelaporan adalah karena tidak adanya informasi kelahiran dari peternak sehingga Petugas baru mengetahui ada ternak yang lahir pada saat permintaan IB dari peternak dan Petugas baru mengetahui bahwa ternak yang akan di IB nya tersebut merupakan ternak yang sudah di IB sebelumnya yang biasanya dilakukan 2 (dua) bulan setelah kelahiran ternak. Disamping itu ada juga Petugas Lapangan yang seharusnya melaporkan dan mengupdate data setiap selesai

melakukan pelayanan kadang tidak melakukan update data secara disiplin sehingga realisasi capaian yang diaporkan lebih sedikit daripada kenyataan di lapangan. Apalagi dengan bergantinya aplikasi pelaporan Inseminasi Buatan Ternak dan Pelaporan Kelahiran yang sebelumnya menggunakan Isikhnas berganti menjadi Aplikasi Indentik sehingga semakin banyak data yang tidak terlapor karena belum semua data dilaporkan ke Indentik oleh Petugas di lapangan.

Dalam upaya peningkatan populasi melalui Inseminasi Buatan ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau didukung dari anggaran APBD Riau dan dari APBN dalam bentuk *sharing budget* untuk pembelian semen beku, Fasilitas alat dan bahan IB, Pengadaan N2 Cair, Operasioanal N2 Cair, operasional IB, Operasional Pemeriksaan Kebuntingan, Operasional Kelahiran, Pembelian hormon dan vitamin, dan belanja jasa kegiatan lainnya.



Gambar 3.6. Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB)



Gambar.3.7. Anak Sapi Hasil Inseminasi Buatan

Dalam menghadapi kendala peningkatan populasi ternak untuk meningkatkan produksi daging, solusi yang telah dilakukan diantaranya adalah :

- Untuk mengatasi luasnya jangkauan pelayanan IB oleh Petugas, maka dilakukan sentralisasi atau intensifikasi IB melalui zonasi sentra pengembangan ternak.

- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Petugas IB, Petugas PKB dalam memberikan pelayanan IB, PKB dan penanganan gangguan reproduksi ternak
- Melakukan sinkronisasi IB, dimana ternak-ternak sapi dikumpulkan pada suatu tempat dan dilakukan IB secara serentak
- Memberi pembinaan terhadap kelompok untuk penerapan prinsip-prinsip sistem perbibitan ternak
- Memberikan pembinaan dan pemantauan kepada peternak/kelompok akan penting pakan dalam usaha budidaya ternak.
- Penambahan petugas teknis peternakan sehingga petugas dapat membina kelompok secara maksimal
- Peningkatan biaya operasional pelaporan Petugas sehingga petugas pelaksana pelapor termotifasi untuk melaporkan data secara realtime melalui iSHIKHNAS.

Selain peningkatan populasi ternak dengan Inseminasi Buatan (IB) dan Kawin Alam, peningkatan produksi dan produktifitas ternak juga dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pakan ternak. Pakan menjadi faktor strategis dalam usaha peternakan dan sangat berpengaruh terhadap produksi dan produktifitas ternak, serta akan mempengaruhi kualitas produksi hasil ternak. Pakan memegang peranan penting dalam satu usaha peternakan, dimana hampir 70 % biaya yang dibutuhkan dalam suatu usaha peternakan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis ternak.

Untuk meningkatkan efisiensi dalam penyusunan pakan dan menjaga mutu pakan diperlukan penerapan system manajemen mutu pakan yang diawali mulai dari pengadaan bahan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan sampai pakan diberikan kepada peternak.

Pakan yang diproduksi baik di tingkat produsen besar maupun di tingkat kelompok yang dimanfaatkan untuk kalangan sendiri atau diperdagangkan harus berpedoman pada persyaratan yang tertera dalam Permentan No. 22 Tahun 2017 dan Kepmentan No. 240/Tahun 2003. Oleh karena itu dalam penerapannya di lapangan perlu ditindaklanjuti dengan pengawasan terhadap pembuatan untuk menjamin agar pakan yang

diproduksi yang diberikan kepada ternak serta diperdagangkan tetap terjaga mutunya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang dipersyaratkan.

Berdirinya Unit-unit Pengolahan pakan ternak dan Bank Pakan di tingkat kelompok ternak yang berperanan sebagai produsen pakan olahan sendiri, diharapkan menjadi cikal bakal pembentukan pabrik pakan yang dapat menghasilkan pakan komersil untuk diperdagangkan. Untuk itu perlu didampingi dan dilakukan pembinaan agar mutu dan keamanan pakan yang di produksi sesuai dengan standar. (*safety Feed to Safety Food*).



Gambar 3.8. Pembinaan Dan Pengawasan Manajemen Mutu Pakan

Permasalahan lain yang menyebabkan lambatnya peningkatan populasi ternak dan produksi daging ruminansia di Provinsi Riau adalah dikarenakan :

- Usaha peternakan sebagian besar didominasi oleh peternak kecil dengan keterampilan beternak yang masih rendah (penguasaan teknologi dan informasi peternakan yang kurang). Sistem pemeliharaan didominasi oleh ekstensif maupun semi intensif dan hanya sebagian kecil yang intensif sehingga produktivitas tidak optimal.
- Terbatasnya ketersediaan pakan ternak berkualitas. Budidaya bahan baku pakan dan pengolahan pakan masih terbatas hanya skala rumah tangga oleh masyarakat peternak lokal. Tingginya harga bahan baku tambahan pakan seperti obat, vitamin dan mineral yang tidak bisa dijangkau secara langsung oleh peternak. Peternak lokal dengan keterbatasan biaya pengadaan pakan hanya mengambil langkah alternatif lain yaitu dengan tetap mempertahankan cara pengolahan pakan secara tradisional dan

konvensional tanpa didukung pengetahuan dan teknologi terkini dan modern.

- Adanya ancaman penyakit menular yang berpotensi menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya (Zoonosis).

Alternatif solusi yang dilakukan untuk menunjang peningkatan produksi daging ruminansia lokal serta mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan:

- Memprioritaskan pengembangan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang diarahkan pada perbaikan mutu bibit ternak, pengembangan pakan ternak yang murah dan berkualitas, peningkatan pelayanan kesehatan hewan serta melakukan pengawasan dan pengujian kualitas produk asal hewan.
- Memacu kegiatan IB melalui optimalisasi akseptor, dan penguasaan teknologi Inseminasi Buatan, melengkapi sarana dan prasarana inseminasi buatan serta sinkronisasi IB.
- Memberikan bantuan pakan ternak, dan atau fasilitasi pelatihan bagaimana menyediakan pakan ternak berkualitas dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan potensi sumber daya lokal.
- Mengembangkan sistem integrasi ternak tanaman terutama ternak sapi dan sawit dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani berupa upaya peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan limbah tanaman sebagai pakan lokal dan pemanfaatan limbah ternak dalam bentuk padat dan cair.
- Pengembangan SDM dan kelembagaan agribisnis peternakan

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Program yang mendukung peningkatan produksi daging terdiri dari tiga program yakni Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dan Program Penyuluhan Pertanian dengan total anggaran Rp.20.034.446.022,-.

Tabel 3.9. Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Produksi Daging	Produksi Daging	80.632 Ton	84.615 Ton*	104,94 %	20.034.446.022	18.056.109.811	90,13%

Dari Tabel 3.9. dapat dilihat bahwa pada sasaran strategis meningkatnya produksi daging, capaian kinerja nya melebihi target dengan tingkat capaian 104,94% dan penyerapan anggarannya hanya 90,13%, dalam artian kinerja dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat sehingga dapat dikatakan lebih efisien.

Analisis efisiensi dapat dilakukan bila capaian kinerja melebihi 100% dan realisasi anggaran kurang dari 100%, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.10. Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya produksi daging	Produksi daging	104,94%	90,13%	14,81 %

Dari Tabel 3.10 terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran Meningkatnya Produksi Daging sangat baik. Hal ini menunjukkan capaian kinerja produksi daging sebesar 104,94%, melebihi target yang telah ditetapkan, dengan serapan anggaran sebesar 90,13% dengan tingkat efisiensi mencapai 14,81%.

4. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja Produksi Daging

Untuk mencapai target yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja yakni pada sasaran strategis meningkatnya produksi daging dengan Indikator Kinerja Produksi daging pencapaiannya ditunjang dari 3 (tiga) Program yakni Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dan Program Penyuluhan Pertanian. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang termasuk turut mendukung pencapaian peningkatan produksi daging adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Peningkatan Produksi Daging

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN (%)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN KEUANGAN
1	Meningkatnya produksi daging	Produksi Daging (ton)	80.632 Ton	84.615 Ton*	104,94%	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi (Persen)	1,85	2,55	137,84	10.042.141.000	9.602.785.848	95,62
						Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok yang mengembangkan SDGH (Kelompok)	2	2	100	300.940.000	241.558.747	80,27
						Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan (Laporan)	1	1	100	300.940.000	241.558.747	80,27
						Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah produksi pakan unggul (Ton)	1.350	1.477	96,24	67.065.000	54.359.000	81,05
							Jumlah Semen Beku Yang Memenuhi SNI (dosis)	55.000	65.921	119,86	2.078.156.100	1.671.120.311	80,41
						Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (Laporan)	1	1	100	67.065.000	54.359.000	81,05
						Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Persentase Angka kelahiran (Persen)	13,2	9,22	79,16	1.631.523.000	1.393.954.887	85,44

						Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat (Laporan)	1	1	100	82.210.000	56.657.387	68,92
						Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi (Laporan)	12	12	100	1.440.085.000	1.273.539.000	88,43
						Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar (Dokumen)	5	5	100	109.228.000	63.758.500	58,37
						Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Bibit Ternak yang disediakan (Satuan Ternak)	535	535	100	8.042.613.000	7.912.913.214	98,39
						Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain (Ekor)	42.165	42.165	100	8.042.613.000	7.912.913.214	98,39
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase sentra komoditas peternakan yang dikembangkan (Persen)	27	37,74	139,78	1.647.313.500	1.441.087.435	87,48
						Penataan Prasarana Pertanian	Presentase kelompok yang memanfaatkan prasarana (Persen)	27	36,43	134,93	1.647.313.500	1.441.087.435	87,48
						Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	22	22	100	1.647.313.500	1.441.087.435	87,48

						Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	7	7	100	1.854.434.560	1.277.049.772	68,86
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok yang membentuk korporasi (Persen)	5	4	66,67	2.287.298.689	2.202.738.525	96,30
						Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok yang dinaikkan status kelas kelompoknya (Kelompok)	77	24	31,17	2.004.757.435	1.980.207.275	98,78
						Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	661	661	100	2.004.757.435	1.980.207.275	98,78
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok ternak yang menerapkan sistem agribisnis (Kelompok)	60	26	100	282.541.254	222.531.250	78,76
						Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	2	2	100	282.541.254	222.531.250	78,76

Dari Tabel 3.11. terlihat bahwa untuk meningkatkan produksi daging, program yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau adalah Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dan Program Penyuluhan Pertanian.

Outcome yang diharapkan dari ketiga program ini adalah peningkatan jumlah populasi ternak yang secara langsung akan meningkatkan produksi daging. Penambahan populasi ternak dapat dilakukan melalui penambahan kelahiran baik yang berasal dari Inseminasi Buatan ataupun yang berasal dari kawin alam. Pada tahun 2024 terjadi penambahan kelahiran sapi sebanyak 11.625 ekor baik yang berasal dari Inseminasi Buatan maupun dari kawin Alam sebagai outcome dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.



Pada tahun 2024 capaian sasaran strategis angka produksi daging sudah mencapai target bahkan melebihi target mencapai 104,94%. Produksi daging dari tahun 2021 hingga 2024 cenderung mengalami kenaikan. Sub Kegiatan yang menunjang peningkatan produksi daging pada Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian adalah Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan dengan capaian kinerja 100%, Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi dengan capaian kinerja 100%, Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak dengan capaian 100%, Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dengan capaian kinerja 100%. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT Bahan Pakan, Pakan Kewenangan Provinsi dengan Tingkat capaian kinerja 100% dan Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain capaian kinerjanya juga 100%.

Pada Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian seluruh Sub Kegiatannya mencapai target 100%, terdiri dari sub kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pasca Panen Peternakan dengan capaian kinerja 100% dan sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian Serta Sarana Pendukungnya dengan capaian 100%.

Pada Program Penyuluhan Pertanian, pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani capaiannya 100% dimana kelompok petani yang mendapat penyuluhan sebanyak 661 kelompok. Pada sub Kegiatan Pendampingan Manajemen Korporasi Petani capaian kinerjanya 100%.

Secara umum kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan produksi daging terlaksana dengan baik. Dengan capaian kinerja yang tinggi dari masing-masing kegiatan dan sub kegiatan pada ketiga program tersebut memberi pengaruh yang besar pada outcome peningkatan populasi dan produksi daging.

SASARAN II: TERJAMINNYA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Pengukuran sasaran Strategis II yakni Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner diukur dengan 2 (dua) indikator yakni :

1. Persentase Status Kesehatan Hewan
2. Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Indikator Persentase status kesehatan hewan menunjukkan tingkat terkendalinya penyakit hewan di suatu wilayah. Indikator Persentase Status Kesehatan Hewan dihitung dengan rumus jumlah hewan sembuh dibagi jumlah hewan sakit yang mendapat pelayanan hewan dikali seratus persen.

$$\text{Persentase Status Kesehatan Hewan (\%)} = \frac{\text{Jumlah Hewan Sembuh}}{\text{Jumlah Hewan Sakit yang Mendapatkan Pelayanan Hewan}} \times 100\%$$

Sedangkan indikator Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) diukur dengan menghitung jumlah produk pangan asal hewan dari unit usaha ber NKV (Nomor Kontrol Veteriner) dibagi jumlah produk pangan asal hewan yang beredar di kali seratus persen.

$$\text{Persentase Produk Hewan yang ASUH (\%)} = \frac{\text{Jumlah produk pangan asal hewan dari unit usaha ber NKV (Nomor Kontrol Veteriner)}}{\text{Jumlah produk pangan asal hewan yang beredar}} \times 100\%$$

I. PERSENTASE STATUS KESEHATAN HEWAN

1. Realisasi Persentase Status Kesehatan Hewan Tahun 2024, Perbandingan Dengan Realisasi Tahun Lalu Serta Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra

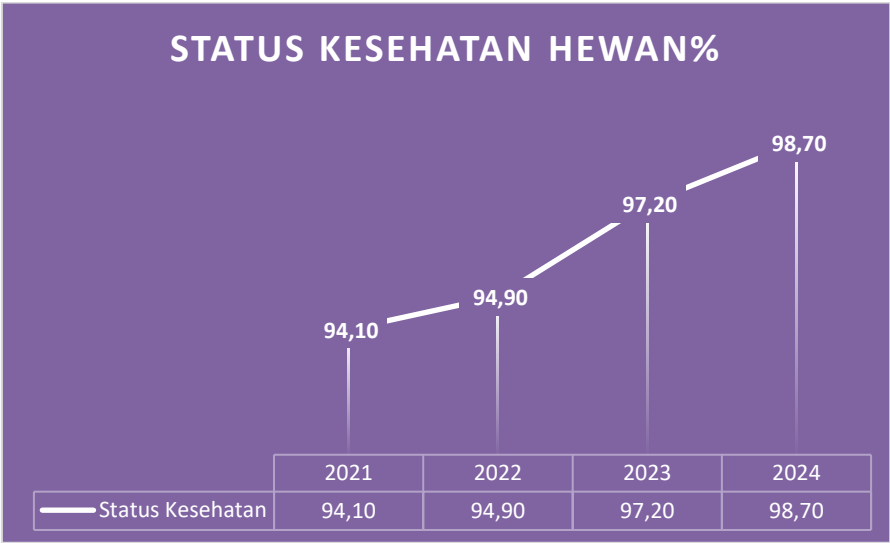


Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner dengan indikator Persentase Status Kesehatan Hewan, realisasinya 98,7% dengan tingkat capaian kinerjanya 100,7% dengan kategori capaian kinerja Sangat Tinggi.

Tabel 3.12. Perbandingan capaian kinerja Status Kesehatan Hewan Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Tahun- Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status Kesehatan Hewan (%)	95,90	94,10	96,12%	96,60	94,90	98,24%	97,3	96,47	99,15%	98	98,7	100,70%

Dari Tabel 3.12. dapat dilihat bahwa persentase status kesehatan hewan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, Persentase status kesehatan hewan tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,5% dimana tahun 2023 persentase status kesehatan hewan sebesar 97,2%. Dan Tahun 2024 tingkat capaian kinerja melebihi target lebih dari 100% sedangkan tahun 2023 tidak sampai 100%.



Gambar 3.9 Perkembangan status Kesehatan Hewan

Dari Gambar 3.9. dapat dilihat bahwa Status Kesehatan Hewan dari tahun 2021-2024 mengalami peningkatan. Status Kesehatan Hewan pada tahun 2021 sebesar 94,1%, Tahun 2022 meningkat menjadi 94,9% naik 0,8% dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 Status Kesehatan Hewan meningkat 2,3% dibanding tahun menjadi 97,2% dan tahun 2024 mengalami peningkatan lagi sebesar 1,5% sehingga menjadi 98,7%.

Meningkatnya status kesehatan hewan tahun 2024 dipengaruhi oleh tindakan penanggulangan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan secara optimal kepada ternak, vaksinasi ternak dilakukan secara terjadwal (PMK, LSD, Jembrana, dan SE), meningkatnya kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat emerging dan emerging disease melalui pengawasan lalu lintas hewan di perbatasan, peningkatan surveilans sebagai pengamanan penyakit hewan, penurunan kasus secara signifikan pada penyakit PMK dan LSD, adanya pengadaan obat-obatan dan vaksin yang mencukupi, dan adanya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang intens dilakukan oleh petugas sehingga peternak sudah mulai peduli terhadap ternak dan penyakit ternak.

2. Analisis Capaian Kinerja/Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Indikator persentase status kesehatan hewan digunakan untuk mengukur kinerja sasaran strategis dinas yang II yakni sasaran terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Dari Tabel 3.2. dapat diketahui pada capaian Indikator Kinerja Utama yang II yakni Persentase Status Kesehatan hewan tahun 2024 adalah sebesar 98,7% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,7%. Capaian ini menunjukkan hasil penilaian pada kategori sangat tinggi dan bisa dikategorikan sudah mencapai target yang ditetapkan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung peningkatan persentase status kesehatan hewan diantaranya adalah dengan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pengamatan penyakit hewan, pemenuhan sarana prasarana kelembagaan (Puskeswan) dan SDM Kesehatan Hewan dan pengawasan kesehatan hewan. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan telah dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular prioritas Provinsi Riau yakni Rabies, Avian Influenza, Brucellosis, Anthraks, Hog Cholera, Jembrana, Lumpy Skin Disease (LSD), Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), SE, Helminthiasis, dan Parasit Darah. Dalam mencegah dan memberantas berbagai penyakit tersebut diantaranya dengan melakukan vaksinasi, pemberian obat-obatan dan pengawasan ketat lalu lintas ternak di perbatasan provinsi.

Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular terutama pada saat terjadi wabah LSD dan PMK. Adapun langkah-langkah yang ditempuh antara lain dengan penyusunan rancangan kebijakan, program dan anggaran di Bidang Kesehatan Hewan, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, penyusunan perundangan dan penegakan aturan-aturan di Bidang Kesehatan Hewan, pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia melalui bimtek dan workshop, sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan *public awareness*, serta penyediaan sarana dan prasarana di Bidang Keswan dan Kesmavet.

Telah diterbitkan beberapa peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan di Bidang Keswan dan Kesmavet melalui Peraturan Gubernur (Pergub) antara lain yaitu Pergub Rabies, Pergub Avian Infuenza, Pergub Brucellosis, SK Gubernur tentang Komisi Provinsi Pengendalian Zoonosis yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Gubernur tentang Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis, dan Peraturan Kadis Peternakan tentang Unit Respon Cepat PHMS Provinsi Riau, SK Gubernur tentang Pengawas Obat Hewan Provinsi Riau, SK Gubernur tentang Dokter Hewan Berwenang Provinsi Riau, dan SK Gubernur tentang Otoritas Veteriner Provinsi Riau.

Selain itu, kasus penyakit hewan menular strategis seperti Rabies, Jembrana, SE, PMK, LSD, dan penyakit lainnya berfluktuasi tingkat kejadiannya. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan cuaca, lalu lintas yang tidak terpantau dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara hewan ternak maupun hewan kesayangannya.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan telah dilakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular prioritas Provinsi Riau yakni Jembrana, Rabies, Avian Influenza, Brucellosis, Antraks, Hog Cholera, Helminthiasis dan parasit darah yang telah dilaksanakan setiap tahun dan yang vaksinasi baru yang mulai dilaksanakan tahun 2022 adalah vaksinasi LSD dan Vaksinasi PMK sebagai akibat mewabahnya penyakit tersebut di Provinsi Riau. Dalam mencegah dan memberantas berbagai penyakit tersebut diantaranya dengan melakukan vaksinasi, pemberian obat-obatan dan pengawasan ketat lalu lintas ternak yang berasal dari wilayah endemi. Tahun 2024, walaupun penyakit LSD dan PMK tidak menjadi wabah lagi, namun upaya pengendaliannya tetap dilakukan

dengan melaksanakan vaksinasi LSD dan PMK. Pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan meliputi pengobatan serta vaksinasi pada ternak besar (Jembrana dan SE). Sedangkan untuk vaksinasi LSD dan PMK dalam pelaksanaannya sudah diakomodir melalui dana APBN.

Pelayanan kesehatan hewan di lapangan dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) yang merupakan pelayanan kesehatan hewan terpadu pada tingkat lapangan dilaksanakan oleh tenaga medis, para medis, petugas lapangan atau kecamatan yang sekaligus menjadi ujung tombak dalam pemberian pelayanan kesehatan hewan. Sasaran pelayanan kesehatan hewan terpadu antara lain ternak sebagai objek pelayanan dengan lebih diutamakan pada ternak-ternak milik petani yang tergabung dalam kelompok petani ternak di wilayah inseminasi buatan serta masyarakat penerima paket-paket bantuan ternak pemerintah lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Pengetahuan mengenai kegiatan surveilans kesehatan hewan sangat penting untuk petugas kesehatan hewan disemua tingkatan guna menentukan langkah pengambilan kebijakan dalam pencegahan, pengendalian dan atau pemberantasan penyakit hewan. Dengan adanya iSIKHNAS petugas kesehatan hewan disemua tingkatan menjadi lebih mudah dalam menjalankan tugasnya dan memudahkan dalam pelaporan serta pengambilan kebijakan. ISIKHNAS merupakan sistem pelayanan informasi dan pelaporan terpadu bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan produksi peternakan yang berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi. Dengan ISIKHNAS petugas dapat melaporkan secara *realtime*, dan seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui situasi penyakit yang ada di lapangan secara cepat. Selain pelaporan penyakit hewan, ISIKHNAS juga memfasilitasi pelaporan pemotongan, IB, Produksi, dan perbibitan.

Tabel. 3.13. Pelayanan Kesehatan Hewan

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Hewan	Ekor	49.296	35.366	45.722	55.560	202.863	43.151
2	Vaksinasi							
	a. Jembrana	Dosis	47.909	22.180	23.251	11.482	7.797	4.359
	b. Rabies	Dosis	40.385	36.858	19.173	11.505	25.074	23.241
	c. SE	Dosis	4.848	3.488	98	605	7.429	2.917
	d. LSD	Dosis	-	-	-	36.719	3.222	1.430
	e. PMK	Dosis	-	-	-	142.033	211.210	78.276
3	Penanggulangan Gangrep	Kasus	3.811	2.026	2.048	2.662	1.097	1.132
4	Pemeriksaan Laboratorium	Sampel	75.486	112.634	114.545	124.056	113.184	72.064

Sumber data : iSIKHNAS 2024

Dari tabel.3.13 dapat dilihat bahwa tahun 2024 dalam rangka peningkatan persentase status kesehatan hewan berdasarkan laporan yang masuk ke sistem pelaporan iSIKHNAS pelayanan kesehatan telah ditangani sebanyak 43.151 ekor. Pelaksanaan Vaksinasi terhadap sejumlah penyakit antara lain penyakit Jembrana, Rabies, dan Septicemia Epizooticae (SE) telah dilakukan dengan rincian 4.359 dosis vaksin Jembrana pada Sapi Bali, 23.241 dosis vaksin Rabies pada hewan penular Rabies (anjing, kucing kera), dan 2.917 dosis SE pada sapi dan kerbau, 1.430 dosis untuk LSD dan 78.276 dosis untuk PMK.

Penanggulangan gangguan reproduksi yaitu kegiatan yang bertujuan menanggulangi gangguan reproduksi pada sapi dan kerbau agar ternak dapat bereproduksi kembali. Tahun 2024 telah dilaksanakan penanggulangan gangguan reproduksi sebanyak 1.132 kasus.

Bila dicermati secara keseluruhan, upaya meningkatkan status kesehatan hewan menunjukkan hasil yang memuaskan. Namun capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Beberapa hal permasalahan yang menjadi kendala adalah :

- a. Struktur Organisasi dan Tata Laksana Kerja (SOTK) melaksanakan fungsi Kesehatan Hewan sangat bervariasi di Kabupaten Kota, dan tidak jarang merupakan bagian kecil dari suatu Dinas yang berlingkup luas. Sehingga peran Keswan sebagai pelaksana kesehatan hewan di kabupaten/kota belum optimal, baik dari pelaksanaan program, maupun penganggaran.
- b. Masih banyak penempatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Hewan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, sehingga fungsi kesehatan hewan tidak berjalan secara maksimal, sehingga berdampak pada rendahnya komitmen kabupaten /kota dalam hal penanganan penyakit dan pelayanan kesehatan hewan, serta penegakan aturan-aturan yang telah ada.
- c. Provinsi Riau berbatasan langsung dengan negara luar khususnya Malaysia sehingga mempunyai resiko maupun peluang yang cukup rawan terhadap masuknya penyakit eksotik ke Provinsi Riau.
- d. Kasus penyakit hewan menular strategis seperti Rabies, AI, Jembrana, dan lain-lain berfluktuasi tingkat kejadiannya, hal ini dipengaruhi oleh perubahan cuaca, lalu lintas yang tidak terpantau dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ternak dan hewan kesayangannya.

- e. Orientasi pengendalian penyakit masih terpusat pada penyakit hewan menular strategis, sedangkan penyakit non strategis seperti helminthiasis, penyakit parasit darah dan lainnya belum mendapat perhatian oleh pemerintah setempat, hal ini berdampak pada kerugian ekonomi yang cukup besar.
- f. Berdasarkan data yang didapat dari hasil pengamatan secara aktif ataupun evaluasi dari laporan-laporan yang diterima menunjukkan bahwa penyakit rabies dan AI di Provinsi Riau masih sering muncul dengan tingkat kasus yang berfluktuasi. Untukantisipasi munculnya penyakit sewaktu-waktu, maka dilakukan pengamatan ke lokasi-lokasi yang pernah terjadi kasus penyakit atau daerah rawan secara terprogram.
- g. Masih belum lancarnya penyampaian pelaporan kasus penyakit dari kabupaten/kota, sehingga kasus kejadian suatu penyakit menjadi sulit terdeteksi.
- h. Masih minimnya sumber anggaran baik dari APBN maupun APBD Provinsi Riau, kabupaten/kota dalam penanggulangan penyakit hewan menular yang di disertai dengan terbatasnya sarana obat hewan dan hanya mengandalkan anggaran dari provinsi.
- i. Belum optimalnya pelayanan puskesmas sesuai dengan ketentuan yang ada (Permentan No. 64 tahun 2007) yang disebabkan karena keterbatasan jumlah petugas puskesmas baik medis maupun paramedis, sarana obat hewan dan kendaraan operasional yang belum memadai serta luasnya wilayah yang menjadi daya jangkau kerja bagi petugas.
- j. Distributor, depo dan toko sebagai penyedia sarana produksi peternakan diharapkan dapat menyediakan produk obat hewan, vaksin dan lain-lainnya yang berkualitas, maka untuk itu perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk yang dipasarkan agar tetap terjaga mutunya. Keterbatasan tenaga pengawas obat hewan yang ada di kabupaten/kota ataupun di Provinsi berakibat kepada pembinaan yang dilakukan tidak optimal.
- k. Semakin meningkatnya arus lalu lintas ternak yang ramai lancar dan sulit dipantau ke Provinsi Riau baik antar provinsi dan kabupaten/kota sehingga Provinsi Riau rawan terhadap masuknya penyakit hewan menular dari daerah lainnya, hal ini terkait dengan minimnya petugas baik secara kualitas maupun kuantitas serta masih terbatasnya area *chek point* pada masing-masing

kabupaten/kota. Sedangkan pada kabupaten/kota yang telah memiliki area *chek point*, tidak dapat difungsikan secara optimal.

- l. Adanya mutasi petugas teknis lapangan ke instansi lain dan digantikan dengan petugas non teknis, sehingga pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan di lapangan tidak berjalan dengan baik dan optimal.
- m. Lemahnya pengawasan pada pintu masuk (*chek point*) dan banyak peluang masuknya ternak atau hewan melalui pelabuhan yang tidak resmi menyebabkan terjadinya kembali penularan rabies pada daerah yang sebelumnya sudah bebas rabies.

Alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan dalam upaya meningkatkan keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan Petugas Pelayanan Veteriner (PPV) di lapangan melalui *SMS Gateway* dan *iSIKHNAS*, sehingga informasi penyakit dapat diketahui dengan cepat, seperti Rabies, AI dan SE yang berkaitan dengan kondisi kurang mendukung seperti banjir dan serta cuaca ekstrem dengan penyampaian pelaporan penyakit dikirimkan dengan tepat waktu atau *realtime*.
- b. Agar informasi tentang penyakit dapat diketahui, maka diupayakan pengoptimalan petugas PPV dilapangan yang menginformasikan selain penyakit prioritas sehingga informasi dapat diketahui dengan cepat.
- c. Keterbatasan SDM diupayakan melalui penerimaan tenaga medis dan non medis yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota kabupaten/kota serta dropping THL dari pusat.
- d. Dalam upaya meningkatkan kemampuan SDM dilapangan, maka dilakukan pelatihan-pelatihan, magang, pertemuan teknis dibidang kesehatan hewan.
- e. Dalam penyediaan sarana prasarana dibidang keswan, maka diharapkan kabupaten/kota juga mengalokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten/Kota, disamping sharing melalui anggaran APBD Provinsi dan APBN pusat, untuk itu perlu koordinasi dan informasi yang baik sehingga kegiatan pelayanan keswan dapat berjalan dengan baik.
- f. Dalam upaya mempertahankan atau mencegah masuknya Penyakit Hewan Menular (PHM) baik dari antar provinsi, antar pulau, dan antar kabupaten/kota, maka perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap pemasukan ternak yang masuk ke wilayah Provinsi Riau dengan memperhatikan persyaratan-

persyaratan administrasi dan teknis serta melakukan pengujian kembali melalui pemeriksaan laboratorium terhadap ternak tersebut.

- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti dinas perhubungan, karantina, Polri dalam hal pengawasan lalu lintas ternak dan upaya penanggulangan penyakit di area *chek point* perbatasan.
- h. Kurang prioritasnya dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/kota, maka perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dan himbauan serta pendekatan agar fungsi keswan dalam hal penanggulangan penyakit menjadi perhatian utama.
- i. Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan hewan melalui puskesmas, maka diupayakan peningkatan sarana puskesmas, SDM (medis, paramedis, Vaksinator, ATR), obat-obatan, kendaraan operasional yang diupayakan melalui anggaran APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan APBN Pusat.
- j. Merintis pembebasan bagi daerah-daerah yang berpotensi untuk dibebaskan penyakit secara bertahap serta melakukan kajian analisa resiko terhadap daerah yang dibebaskan.

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan.

Program yang mendukung peningkatan status Kesehatan hewan adalah Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan total anggaran Rp. 7.034.923.575,-



Pelayanan Medik di UPT LVKH

Tabel 3.14. Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan Indikator Persentase Status Kesehatan Hewan

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	% Capaian
Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status Kesehatan Hewan	98	98,7	100,7	7.034.923.575	6.191.392.137	88,01

Dari Tabel 3.14. dapat dilihat bahwa pada Persentase Status Kesehatan Hewan, capaian kinerja nya melebihi target dengan tingkat capaian 100,7% dan penyerapan anggarannya hanya 88,01%, dalam artian kinerja dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat sehingga dapat dikatakan lebih efisien. Analisis efisiensi dapat dilakukan bila capaian kinerja melebihi 100% dan realisasi anggaran kurang dari 100%, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.15. Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Indikator Persentase Status Kesehatan Hewan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status Kesehatan Hewan	100,7%	88,01%	12,69%

Dari Tabel 3.15 terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indicator Persentase Status Kesehatan Hewan sangat baik. Hal ini menunjukkan capaian kinerja produksi daging sebesar 100,7%, melebihi target yang telah ditetapkan, dengan serapan anggaran sebesar 88,01% dengan tingkat efisiensi mencapai 12,69%.

4. Program/Kegiatan yang mendukung Peningkatan Status Kesehatan Hewan

Pada sasaran strategis Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator Persentase Status Kesehatan Hewan didukung oleh Program `Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Sub Kegiatan pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang mendukung pencapaian peningkatan status kesehatan hewan adalah Sub Kegiatan Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi serta Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Tabel 3.16. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Peningkatan Persentase Status Kesehatan Hewan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN (%)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN KEUANGAN
Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Persentase Status Kesehatan Hewan (%)	98%	98,7%	100,7%	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Persentase Angka Kematian ternak. (Persen)	2,20	1	154,55	7.034.923.575	6.191.392.137	88,01
					Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase penurunan kasus PHMS (Persen)	10	30,10	301	4.929.940.726	4.310.751.103	83,82
					Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	12	12	100	209.519.900	180.743.300	86,27
					Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12	12	100	1.412.211.756	1.362.088.276	96,45
					Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Laporan)	36	36	100	3.308.209.070	2.767.919.527	83,67
					Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Hewan di Check Point (Persen)	90	24,85	27,61	702.781.076	657.241.326	93,52
					Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	60	60	100	702.781.076	657.241.326	93,52

					Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis Keswan kesmavet	25	32	128	1.402.201.773	1.223.399.708	87,25
					Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	270	398	147,41	1.402.201.773	1.223.399.708	87,25

Dari Tabel 3.16 dapat dilihat bahwa dalam rangka Menjamin Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk indikator Persentase Status Kesehatan Hewan didukung dengan **Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner** dengan indikator angka kematian ternak. Capaian kinerja Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada indikator Persentase Kematian Ternak capaiannya telah melebihi target dimana angka kematian ternak 1% sementara targetnya 2,2% sehingga capaian kinerjanya 154,55%.

Pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kegiatan yang mendukung peningkatan Status Kesehatan Hewan adalah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan indikator Persentase Penurunan kasus PHMS realisasinya 30% dengan tingkat capaian 300%. Hal tersebut didukung dengan keberhasilan dalam penanggulangan dan pengendalian wabah penyakit terutama PMK dan LSD yang terjadi di tahun 2022 dan 2023. Selain itu, kegiatan seperti pengamatan penyakit hewan dan peningkatan pengawasan lalu lintas hewan diperbatasan merupakan faktor penurunan kasus PHMS. Sub kegiatannya diantaranya adalah Sub Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan dengan capaian kinerja 100%, Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan dengan capaian kinerja 100%, Sub Kegiatan Pemeberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan Tingkat capaian kinerja 100%.

Kegiatan lainnya yang mendukung Status Kesehatan Hewan adalah Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi dengan capaian kinerja 27,61%. Rendahnya capaian kinerja pada kegiatan ini adalah disebabkan adanya peraturan baru tentang persyaratan lalulintas ternak yang diatur dalam Permentan nomor 17 tahun 2023 dan belum semua pelaku lalulintas HPM mengetahui menerapkan aturan tersebut. Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dengan Tingkat capaian 100%.

II. PERSENTASE PENINGKATAN PRODUK HEWAN YANG AMAN SEHAT UTUH DAN HALAL (ASUH)

1. Realisasi Persentase Produk Asal Hewan yang ASUH Tahun 2024, Perbandingan Dengan Realisasi Tahun Lalu Serta Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra

Capain sasaran Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan Indikator Persentase Produk Hewan yang ASUH Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17. Capaian Kinerja Produk Asal Hewan yang ASUH

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA	KATEGORI PENILAIAN
Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Produk Asal Hewan Yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	5%	5,71%	114,2%	Sangat Tinggi



Dari dari Tabel 3.14 dan Gambar 3.2 dapat dilihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2024 untuk sasaran strategis II : Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator Persentase Produk

Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal terlihat bahwa termasuk pada kategori penilaian sangat tinggi dengan capaian melebihi target.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, target Persentase Produk Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal sebesar 5%, dan realisasi 5,71% dengan tingkat capaian 114,2%.

Realisasi tahun 2024 tidak terlepas dari realisasi tahun-tahun sebelumnya. Membandingkan realisasi saat ini dengan tahun sebelumnya berguna untuk melihat pertumbuhan capaian dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2022 dan 2023) dapat dilihat bahwa persentase produk asal hewan yang ASUH meningkat setiap tahunnya. Tahun 2024 persentase produk asal hewan meningkat 1,23% dari tahun 2023, dimana pada tahun 2023 persentase produk asal yang ASUH sebesar 4,48% dan tahun 2024 sebesar 5,71%.

Tabel. 3.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Produk Asal Hewan yang ASUH Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran	Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase produk Asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	5%	4,32	86,40%	5%	4,48%	89,60%	5%	5,71%	114,2

Untuk mengetahui sampai sejauh mana capaian target renstra, maka dilakukan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2024 dengan target akhir renstra yakni target sampai dengan tahun 2024.

Tabel.3.19.Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir Renstra	Realisasi s.d.Tahun 2024	Capaian Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra
Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase produk Asal hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)	15	14,48%	96,53%

Pada Renstra Perubahan Tahun 2029-2024 target akhir Renstra untuk Persentase Produk Asal Hewan yang ASUH sebesar 15%, sehingga bila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2024 sebesar 14,48 dengan

Tingkat capaian 96,53, maka capaian target akhir renstra belum tercapai namun sudah mencapai kategori penilaian kinerja yang sangat tinggi

2. Analisis Capaian Kinerja/Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

Indikator persentase produk asal hewan yang ASUH merupakan indikator kinerja Utama yang baru yang muncul setelah adanya Perubahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Indikator ini merupakan salah satu indikator dari sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yakni pada sasaran strategis Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Berdasarkan Tabel 3.14 realisasi kinerja pada indikator Utama ini sebesar 5,71% dari 5% yang ditargetkan dengan tingkat capaian kinerja 114,2%.

Daging, susu, telur serta olahannya adalah produk pangan asal hewan yang menjadi sumber protein yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari, selain itu protein ini juga bermanfaat untuk memperbaiki serta memelihara jaringan tubuh. Kandungan gizi yang tinggi mengakibatkan pangan asal hewan termasuk ke dalam produk pangan yang mudah rusak (*perisable food*) dan apabila tidak dilakukan pengawasan terhadap keamanan produk dapat menjadi bahaya (*hazardous food*) bagi konsumen dan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, **Pasal 58 (ayat 1)**, bahwa dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) bagi yang dipersyaratkan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melaksanakan pengawasan pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan. Pemerintah dan unit usaha produk asal hewan wajib untuk melakukan upaya-upaya penjaminan produk hewan sehingga memenuhi persyaratan dari segi kelayakan, keamanan, kesehatan, keutuhan maupun kehalalan bagi produk yang dipersyaratkan.

Pasal 58 (ayat 2), pengawasan, pemeriksaan dan pengujian produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan

pada waktu pengedaran setelah pengawetan. Pengawasan terhadap unit usaha penyedia produk hewan sangat penting dilakukan demi melakukan penjaminan kepada konsumen bahwa produk yang diterima adalah produk yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) bagi produk yang dipersyaratkan.

Penerapan pengawasan praktik higiene sanitasi, penjaminan keamanan serta mutu produk hewan dilakukan secara konsisten menurut aturan dan standar operasional yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan peraturan terkait pengawasan dan pembinaan unit usaha melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV). NKV merupakan bukti tertulis pemerintah terhadap penerapan higiene sanitasi dan keamanan, serta mutu produk. **Pasal 60 (ayat 1 dan 2)** menyatakan setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh NKV kepada pemerintah daerah provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri, Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan NKV. Unit usaha yang sudah memenuhi syarat melalui pembinaan oleh kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan NKV akan dilaksanakan audit sertifikasi NKV oleh Auditor NKV provinsi. Selanjutnya setelah unit usaha menerapkan praktik higiene sanitasi mendapatkan sertifikat NKV sesuai dengan levelnya (level 1 : sangat baik, level 2: baik, dan level 3 : cukup). Unit usaha yang sudah bersertifikat NKV akan dilakukan surveilans oleh tim provinsi. Surveilans adalah kegiatan pemantauan secara berkala terhadap penerapan cara yang baik di Unit Usaha Produk Hewan yang telah memperoleh NKV.

Pada praktik di lapangan khususnya unit usaha yang belum memiliki standar manajemen atau cara yang baik dalam penanganan produk/penerapan higiene sanitasi dan penjaminan keamanan produk serta pemotongan hewan ternak yang dilakukan di RPH menimbulkan dampak atau resiko buruk terhadap keamanan produk atau mutu serta kesehatan manusia. Selain faktor manajemen usaha, biaya produksi dan nilai ekonomi produk memicu munculnya praktik penyimpangan kesmavet. Bentuk penyimpangan penerapan persyaratan higiene sanitasi dan keamanan pangan yaitu masih ditemukannya proses penangangan karkas di rumah potong hewan yang dilakukan di lantai atau pemotongan hewan dilaksanakan di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) yang tidak resmi dikarenakan kondisi RPH

kurang layak (kondisi fisik seperti “bangunan, peralatan” dan kondisi operasional, sarana, higiene dan sanitasi, lingkungan serta suplai air bersih), penerapan kesejahteraan hewan terhadap ternak maupun hewan non ternak yang terabaikan, proses pengangkutan produk hewan baik dalam bentuk segar dan beku yang tidak memperhatikan sistem rantai dingin dan ketentuan alat angkut, pencampuran daging sapi segar dengan daging kerbau beku, penjualan daging di pasar tradisional yang tidak menggunakan sistem penyimpanan dingin, pengawasan olahan curah yang sulit dilakukan (keterangan masa kadaluarsa produk, jenis dan asal produk, sertifikasi halal, dll) serta ketidakpatuhan pemenuhan administrasi dan persyaratan teknis dalam proses pemasukan/pengeluaran produk hewan.

Penerapan penjaminan higiene sanitasi, mutu dan keamanan produk hewan memberikan nilai tambah jaminan keamanan produk sehingga meningkatkan daya saing produk di pasaran, mendapatkan jaminan keamanan pangan asal hewan yang ASUH atau aman, sehat, utuh, dan halal (perlindungan kesehatan) dan merupakan sarana penelusuran sumber produk yang efektif dalam rantai keamanan pangan sehingga dapat dengan mudah ditelusuri.

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Di Provinsi Riau bertujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas dilapangan agar pembinaan praktek teknis kesehatan Masyarakat veteriner dapat ditingkatkan sehingga unit-unit usaha yang bergerak pada produk hewan dapat terjamin ASUH dan praktek hygiene sanitasinya.

Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan lainnya (HPM) merupakan rangkaian penilaian pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi, penjaminan keamanan dan mutu produk hewan di unit usaha produk hewan dengan tujuan akhir yaitu sertifikasi NKV unit usaha. Alur proses sertifikasi NKV yaitu dimulai dari pembinaan NKV yang dilaksanakan oleh petugas kabupaten/kota, selanjutnya terhadap unit usaha yang telah dilakukan pembinaan NKV dan memenuhi kriteria NKV maka unit usaha dapat diajukan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau untuk proses verifikasi dan atau penilaian/Audit NKV.

Unit usaha yang berhasil mendapatkan sertifikasi NKV menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berjumlah 6 unit usaha yang berhasil mendapatkan

sertifikat NKV. Sertifikasi NKV dilakukan di 8 unit usaha tetapi terdapat 2 unit usaha yang tidak mendapatkan sertifikat NKV dikarenakan setelah dilakukan sertifikasi kondisi dan hasil temuan yang tidak mencapai kategori maksimal temuan untuk NKV. Pada akhir 2024 terdapat 2 unit usaha yang tutup.

Berdasarkan perkembangan unit usaha ber NKV terdapat 38 unit usaha yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota diantaranya Kota Pekanbaru 27 unit, Kabupaten Kampar 3 unit, Kabupaten Pelalawan 3 unit, Kabupaten Bengkalis 1 unit, Kota Dumai 1, Kabupaten Kuantan Singingi 1 unit usaha, Kabupaten Siak 1 Unit Usaha dan Kabupaten Indragiri Hilir 1 Unit Usaha. Pelaksanaan surveilanse dilakukan 1-3 kali proses penilaian, tergantung kepada status penilaian (level penilaian NKV) di masing-masing unit usaha.

Selain itu dalam hal melaksanakan tugas sertifikasi, surveilans NKV, pengawasan produk hewan dan restrukturisasi management rumah potong hewan dilakukan peningkatan kompetensi SDM yaitu berupa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Auditor, Pengawas Kesmavet, Refresher Auditor, dan refresher Pengawas Kesmavet.

Advokasi pengawasan keamanan produk hewan menjamin keamanan dan kualitas produk hewan serta mencegah terjadinya resiko bahaya akibat penyakit hewan dalam rangka menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menjamin keamanan pangan diantaranya adalah pengujian uji *Total Plate Count* (TPC), pengujian *E. Colli*, pengujian Coliform dan pengujian nitrat nitrit.

Pengambilan sampel produk hewan dilakukan dengan lancar, sampel yang diambil berupa produk daging sapi, daging ayam, susu dan telur. Jumlah sampel yang diambil adalah

Tabel. 3.20 Jumlah Sampel yang di lakukan pengujian sampel

No	Nama Sampel	Jumlah Sampel
1.	Daging Sapi	90 Sampel
2.	Daging Ayam	77 Sampel
3.	Susu	15 Sampel
4.	Telur	90 Sampel

Sampel yang diambil diuji dengan pengujian TPC, e-coli, coliform, serta nitrat dan nitrit menghasilkan semua sampel berada diatas dari Batas Minimum Cemarkan Mikroba (BMCM). Hasil pengujian sampel dapat dilihat di lampiran. Pengujian sampel produk hewan yang dilakukan UPT. Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hasil pengujian banyak menunjukkan hasil diatas BMCR terutama pada produk yang berasal dari Gudang pendingin dan ritel hal ini berkaitan dengan metode penyimpanan sampel pada unit usaha. Beberapa sampel menunjukkan hasil uji coliform diatas BMCR. Uji coliform erat hubungannya dengan indikator cemarkan tinja dalam air, maka setiap dalam

pengawasan ataupun surveillans NKV akan diminta untuk melakukan pengujian kualitas air bersih agar kualitas produk tetap terjaga. Selain itu cara pengambilan sampel dan transportasi pengantaran sampel berperan penting dalam terjadi pencemarkan apabila tidak dilaksanakan dengan aseptis.

Pengawasan lalu lintas produk hewan menggunakan aplikasi isikhnas. Setiap produk hewan yang masuk ataupun keluar dari Provinsi Riau dilengkapi dengan surat rekomendasi pemasukan, sertifikat veteriner dan dokumen lainnya. Produk hewan yang masuk ke Provinsi Riau antara lain daging ayam, sapi dan lainnya.

Tabel. 3.21 Jumlah Produk Hewan yang Masuk Ke Provinsi Riau

No	Produk Hewan	Jumlah (Kg)
1	Daging Sapi	739.508
2	Daging Ayam	2.014.615
3	Daging Kerbau	732.626
4	Daging Kambing	44.991
5	Daging Domba	665
6	Daging Bebek	100.635
7	Daging Babi	-
8	Telur Ayam	127.749
9	Telur Itik/Bebek	2.839
10	Telur Puyuh	278
11	Susu	29.313.165
12	Produk Lainnya	63.208.707

Kegiatan Restrukturisasi Manajemen Rumah Potong Hewan (RM-RPH) dilakukan karena secara teknis kondisi umum RPH di Provinsi Riau hingga saat ini belum dapat memenuhi penjaminan keamanan dan mutu produk. Faktor-faktor penyebab yaitu kondisi fisik bangunan lama : kondisi kurang layak lagi (aspek

bangunan, lokasi, sarana, higiene dan sanitasi, lingkungan serta suplai air bersih); kondisi fisik bangunan baru : konstruksi dan desain tidak sesuai dengan persyaratan teknis (mis : tidak sesuai alur proses), kondisi operasional pengolahan karkas menggunakan pola tradisional, belum menerapkan sistem kerja higienis dan sanitair baik peralatan, penanganan daging, higiene personil dan sarana/prasarana lainnya, pemeriksaan antemortem dan postmortem belum sepenuhnya dilaksanakan secara intensif dan dari sisi manajemen pengelolaan RPH relatif lemah : operasionalisasi didominasi pengusaha jagal, kurangnya petugas yang berkompeten : dokter hewan, *meat inspectors* dan *keurmaster*.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan-permasalahan di RPH tersebut yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap peran dan fungsi RPH sebagai prasarana pelayanan penyediaan daging segar bagi masyarakat, maka diperlukan upaya-upaya khusus guna mewujudkan perbaikan-perbaikan baik dari sisi manajemen operasional, fisik bangunan dan peralatan, peningkatan SDM pengelola RPH serta peningkatan kesadaran pengguna jasa RPH (para jagal dan masyarakat) sehingga RPH menjadi parameter penyediaan produk daging segar yang ASUH.

Pada pelaksanaan kegiatan RM-RPH dilakukan dalam dua bentuk kegiatan yaitu kegiatan Sosialisasi dan kegiatan Advokasi dimana kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada Selasa – Rabu tanggal 5-6 Maret 2024, bertempat di Hotel Batiqa Jl. Jendral Sudirman No 17, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Riau, dengan peserta sebanyak 26 orang terdiri dari 10 orang dari kota Pekanbaru, 4 Orang dari kota Dumai, 4 Orang dari kab. Indragiri Hulu, 4 orang Kab. Pelalawan, 4 Orang Kampar, Peserta dari kabupaten/kota ini terbagi atas Kepala dinas/Kepala Bidang, Kepala UPT RPH, Bappeda dan MUI.

Narasumber kegiatan Sosialisasi Restrukturisasi Manajemen Rumah Potong Hewan di Provinsi Riau berasal dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan materi tentang Kebijakan Program Kegiatan Pembangunan RPH dan Materi Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Sertifikasi NKV RPH.

Kegiatan Lanjutan berupa Advokasi RM-RPH yaitu melakukan pendampingan pelaksanaan di beberapa RPH-R di Provinsi Riau antara Lain RPH-R Kota Pekanbaru, RPH-R Kota Bangkinang, RPH-R Rimbo Panjang dan RPH-R Kota

Dumai. Indikator keberhasilan advokasi restrukturisasi manajemen RPH-R yaitu : tersedianya data permasalahan teknis/non teknis yang menjadi kendala operasional RPH-R, dokumen penilaian sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner RPH-R, roadmaps rekomendasi teknis perbaikan manajemen operasional RPH-R. Ruang lingkup restrukturisasi manajemen RPH-R meliputi : penerapan higiene sanitasi, pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem*, penerapan kesejahteraan hewan dan kewajiban surveilan penjaminan keamanan dan mutu produk hewan.

Pelaksanaan pertemuan Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Di Provinsi Riau pada hari Selasa-Kamis tanggal 4-6 Juni 2024. Pemaparan materi dilakukan secara offline dengan memanggil pemateri dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian untuk memaparkan materi yang dibutuhkan dan dilaksanakan juga praktek lapang yang dipandu oleh narasumber. Narasumber yang mengisi acara sosialisasi tersebut adalah drh. Christ Tamboss M,Si selaku Ketua Tim Kerja Higiene dan Sanitasi, drh.Gunawan Setiaji, M.Sc selaku Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis, dan drh. Eka Handayani, M.Si selaku Ketua Tim Kerja Pengawasan Peredaran Produk Hewan. Jumlah peserta terealisasi sesuai target dengan jumlah peserta 30 Orang. Dengan peningkatan kompetensi petugas penilai diharapkan dapat membantu dalam perpanjangan tangan dalam mengawasi kesejahteraan hewan, hygiene sanitasi, pengawasan produk hewan, dan registrasi produk hewan yang ditangani dengan praktek lapangan yang baik.

Tahun 2024 produk pangan asal ternak yang ASUH hanya 5,71%, walaupun target tercapai namun produk asal hewan yang ASUH di Provinsi Riau masih rendah. Penghitungan pangan yang ASUH berasal dari jumlah produk pangan yang berasal dari unit usaha yang sudah ber NKV. Saat ini jumlah unit Usaha pangan asal ternak yang ber NKV hanya 38 unit usaha. Produk pangan asal ternak yang beredar di Provinsi Riau sebagian besar merupakan daging segar yang berasal dari Rumah Potong Hewan. Jumlah Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) di Provinsi Riau tahun 2024 berjumlah 10 unit (7 unit aktif dan 3 unit non-aktif), dan Tempat Pemotongan Hewan Ruminansia (TPH-R) berjumlah 42 unit aktif. Namun RPH-R di Provinsi Riau hanya satu RPH-R yang sudah bersertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (RPH-R Pekanbaru), selebihnya belum ber NKV dan tidak melakukan

pengujian keamanan dan mutu produk secara rutin. Disamping itu sebagian besar RPH-R belum bersertifikasi Halal. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya persentase produk pangan asal ternak ASUH yang beredar di Provinsi Riau.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka penyediaan pangan asal hewan yang ASUH adalah :

1. Pemetaan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terkait program dan kegiatan lingkup bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner belum bersinergi sehingga dalam penjabaran dan pelaksanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan dengan baik antara provinsi dan kab/kota.
2. Advokasi Pengawasan Keamanan Produk Hewan dapat dilakukan dengan baik pada unit usaha, RPH-R dan TPH namun terhadap praktik penindakan hukum terhadap penyimpangan pada mata rantai penyediaan produk pangan asal hewan yang ASUH belum terlaksana.
3. Audit sertifikasi dilakukan dengan pemenuhan persyaratan administrasi teknis. Pemenuhan administrasi dilaksanakan secara online yaitu dengan integrasi antara OSS (Online Single Submission) dengan SISNAS NKV. Dalam pelaksanaannya kendala yang sering terjadi yaitu KBLI (Klasifikasi Baku Lingkungan Usaha Indonesia) milik unit usaha penyedia produk hewan pada sistem OSS yang belum sesuai dengan KBLI yang dapat diakses oleh sistem SISNAS NKV.
4. Kesadaran pelaku unit usaha terhadap penerapan higiene sanitasi, keamanan dan mutu pangan yang masih belum merata. Faktor penyebab adalah biaya produksi/operasional unit usaha yang tinggi dan kebijakan manajemen pada unit usaha.
5. Masalah utama di Rumah potong hewan setelah dilaksanakan Sosialisasi Restrukturisasi Management Rumah Potong Hewan dan advokasi Restrukturisasi Management Rumah Potong Hewan adalah pada bangunan RPH serta SDM di RPH.
6. Peserta Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan bukan merupakan peserta yang melaksanakan fungsi Kesmavet sehingga materi yang disampaikan belum dapat ditindaklanjuti dengan baik. Hal ini juga disebabkan keterbatasan jumlah petugas penerapan persyaratan teknis Kesmavet di lapangan

7. Fasilitas sarana dan prasarana yang masih belum memadai sehingga masih kurangnya kesejahteraan hewan baik di rumah potong maupun di tempat budidaya ternak.
8. Kurang optimalnya pengawasan dan penegakkan hukum pengendalian betina produktif sehingga masih ada beberapa rumah potong yang masih melakukan pemotongan betina produktif.
9. Data pelaporan pemotongan yang masih kurang optimal dikarenakan petugas tidak melakukan pelaporan data dan ada beberapa data yang tidak terbaca di aplikasi iSIKHNAS.
10. Parameter pengujian sampel yang telah diambil tidak bisa langsung diuji di UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau karena adanya keterbatasan parameter yang bisa diuji.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala adalah :

1. Melakukan pemetaan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terkait program dan kegiatan lingkup bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
2. Sosialisasi mengenai proses advokasi regulasi terkait Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dilakukan kepada seluruh *stakeholder*.
3. Koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota/kab terkait proses perizinan di sistem OSS, selanjutnya koordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner yang membidangi sistem SISNAS NKV, serta dilakukan *follow-up* rutin terhadap unit usaha yang mengajukan permohonan NKV.
4. Kegiatan Pengawasan dan sosialisasi serta edukasi kepada *stakeholder* kesmavet dilakukan secara optimal selanjutnya juga dengan pengawasan lalu lintas bidang.
5. Memberikan rekomendasi fasilitasi halal untuk RPH-R pemerintah ke Kementerian Dalam Negeri dan rencana bimbingan teknis juleha sebagai peningkatan kualitas SDM untuk RPH-R Pemerintah.
6. Mengoptimalkan kegiatan pengawasan kesadaran, sosialisasi edukasi kepada *stakeholder* kesmavet serta penguatan jejaring pengawasan lintas bidang

7. Meningkatkan pengetahuan SDM lingkup bidang Kesehatan masyarakat veteriner mengenai tata cara pengajuan NKV, tata cara pengajuan Sosialisasi registrasi Produk Hewan agar dapat disebarluaskan ke para pelaku usaha
8. Mengoptimalkan sosialisai terkait pentingnya kesejahteraan hewan yang mana perlakuan terhadap hewan yang dipelihara untuk diproduksi pangan, berdampak kepada kesehatan manusia.
9. Mengoptimalnya edukasi terkait betina produktif dan memaksimalkan pengawasan dan penegakkan hukum pengendalian betina produktif.
10. Melakukan pelaporan data secara manual, direkap serta dilaporkan ke Dinas Provinsi oleh petugas kabupaten/kota sehingga data tidak hanya diupload ke iSIKHNAS.
11. Melakukan pengiriman sampel yang cepat dan tepat dengan pilihan pengiriman paket satu hari sampai.

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan. Program yang mendukung produk asal hewan yang ASUH adalah Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan total anggaran Rp.427.930.204,-.

Tabel 3.22. Realisasi Kinerja dan Realisasi Keuangan pada Indikator Persentase Produk Asal Hewan Yang ASUH

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Pagu	Realisasi	% Capaian
Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase produk Asal Hewan yang ASUH	5%	5,71%	114,2%	427.930.204	352.174.801	82,30

Dari Tabel 3.22. dapat dilihat bahwa pada Persentase Produk Asal Hewan yang ASUH, capaian kinerja nya melebihi target dengan tingkat capaian 114,2% dan penyerapan anggarannya hanya 82,30%, dalam artian kinerja dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat sehingga dapat dikatakan lebih efisien. Analisis efisiensi dapat dilakukan bila capaian kinerja melebihi 100% dan realisasi anggaran kurang dari 100%, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.23. Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Indikator Persentase Produk Asal Hewan Yang ASUH

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase produk Asal Hewan yang ASUH	114,2%	82,3%	31,9%

Dari Tabel 3.23. terlihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator Persentase Produk Asal Hewan yang ASUH sangat baik. Hal ini menunjukkan capaian kinerja 114,2% melebihi target yang telah ditetapkan, dengan serapan anggaran sebesar 82,3% dengan tingkat efisiensi mencapai 31,9%.

4. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja Peningkatan Produk Asal Hewan yang ASUH

Untuk mencapai target yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja yakni pada sasaran strategis terjaminnya Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner dengan Indikator persentase produk asal hewan yang ASUH pencapaiannya ditunjang dari Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pemabwa Penyakit Hewan Lainnya, dan Sub Kegiatan Pengembangan kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pemabwa Penyakit Hewan Lainnya dengan indicator Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen) capaian kinerjanya mencapai 114,29% , dimana target dokumen yang dikeluarkan sebanyak 56 dokumen dengan realisasi 64 dokumen. Sementara untuk Sub Kegiatan Pengembangan kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan capaian kinerjanya mencapai 100% dengan Target dan realisasi 30 orang Petugas yang mengikuti pengembangan kompetensi.

Tabel 3.24. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Peningkatan Persentase Produk Asal Hewan yang ASUH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN (%)	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024	INDIKATOR	TARGET KINERJA	RELISASI	% CAPAIAN KINERJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% CAPAIAN KEUANGA N
Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2. Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (%)	5,00	5,71	114,2	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2. Persentase Peningkatan Unit Usaha penyedia produk hewan yang menerapkan hygiene sanitasi, mutu dan keamanan produk	10	11,76	117,60	427.930.204	352.174.801	82,30
					Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang memenuhi persyaratan NKV	29	38,00	131,03	427.930.204	352.174.801	82,30
					Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pemabwa Penyakit Hewan Lainnya	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	56	64	114,29	328.690.340	262.103.800	79,74
					Pengembangan kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	30	30	100	99.239.864	90.071.001	90,76

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran 2024 alokasi dana APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebesar Rp.60.837.771.006,-Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi tahun 2024 memiliki 5 Program dengan 18 kegiatan dan 39 sub kegiatan. Realisasi keuangan sebesar Rp 55.698.763.194,- dan dengan tingkat capaian 91,55%.

Tabel 3.25. Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024

	PROGRAM	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.631.947.660	12.642.332.435	92,74%
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.115.199.673	3.211.038.851	78,03%
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	7.462.853.779	6.543.566.938	87,68%
4	Program Penyuluhan Pertanian	2.287.298.689	2.202.738.525	96,30%
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.340.471.965	31.099.086.445	93,28%
	TOTAL	60.837.771.006	55.698.763.194	91,55%

Dari Tabel 3.25. dapat dilihat realisasi anggaran per program sebagai berikut :

- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian jumlah pagu Rp13.631.947.660,- dengan realisasi Rp. 12.642.332.435,- (92,74%)
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pagu Rp.4.115.199.673,- dengan realisasi Rp.3.211.038.851,- (78,03%).
- Program Penyuluhan Pertanian pagu Rp2.287.298.689,- dengan realisasi Rp.2.202.738.525,- (96.30%).

- d) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pagu Rp.7.462.853.779,- dengan realisasi Rp.6.543.566.938,- (87,68%).
- e) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi jumlah Pagu Rp.33.340.471.965,- dengan realisasi keuangan Rp31.099.086.445,- (93,28%).

Disamping dana dari APBD Provinsi Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau juga memperoleh dana untuk pembangunan peternakan dan kesehatan yang berasal dari dan APBN dalam bentuk Tugas Pembantuan. Adapun realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.26.

Alokasi anggaran pada perjanjian kinerja awal sebesar Rp.14.157.802.000,- (Empat Belas Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah). Pada APBN Perubahan anggaran menjadi Rp.12.888.725.000,-(Dua Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua puluh Lima Ribu Rupiah). Realisasi keuangan dari anggaran tersebut sebesar Rp. 12.640.467.673,- atau 98,07% dengan realisasi fisik 98,38%.

Tabel.3.26. Realisasi Anggaran APBN Tahun 2024

Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran		Realisasi Fisik %
		Rp	%	
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS				
1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	875.000.000	875.000.000	100	100
2. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi	583.880.000	581.891.880	99,66	100
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	286.854.000	92.764.846	32,34	33,49
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI				
4. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	670.000.000,-	352.620.420,-	52,63	53,5
Jumlah	2.415.734.000	1.902.277.146	78,75	79,21

BAB IV

PENUTUP

Bab IV berisi :

4.1. Kesimpulan

4.2. Langkah Strategis

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (*good governance*). Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis 2 (dua) sasaran strategis, dengan tiga indikator kinerja utama diketahui bahwa pada sasaran strategis Meningkatnya produksi daging dengan indikator produksi daging menunjukkan hasil kinerja yang sangat tinggi dengan persentase capaian kinerja produksi daging 104,94%. Sasaran strategis terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan indikator kinerja utama persentase status Kesehatan hewan menunjukkan capaian kinerja termasuk pada kategori Sangat Tinggi dengan capaian kinerja 100,7%. Pada indikator kinerja persentase produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) tingkat capaian 114,2%.
2. Permasalahan utama dalam peningkatan produksi daging adalah lambatnya pertumbuhan populasi ternak karena angka kelahiran ternak yang masih tergolong rendah sebagai akibat belum maksimalnya upaya peningkatan

kelahiran melalui Inseminasi Buatan dan Kawin Alam akibat keterbatasan jumlah SDM dan sarana prasarana serta belum diterapkannya GFP oleh peternak akibat keterbatasan pengetahuan dan modal peternak dalam menerapkan GFP. Hal lain yang menyebabkan lambatnya pertambahan popluasi karena terjadinya wabah penyakit

3. Permasalahan utama dalam pengendalian penyakit ternak/hewan adalah karena kurang terpantaunya lalu lintas ternak dari daerah/provinsi lain sehingga resiko masuknya penyakit hewan menular maupun eksotik dari daerah/provinsi lain semakin besar dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara ternak dan hewan kesayangannya.
4. Permasalahan utama dalam pemenuhan produk pangan yang ASUH adalah karena masih minimnya Rumah Potong Hewan ruminansia yang bersertifikat NKV (di Provinsi Riau hanya satu RPH-R yang sudah ber NKV) dan masih minimnya unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis NKV karena kurangnya kesadaran pelaku usaha.

4.2. Langkah Strategis

Langkah strategis yang perlu dilakukan diantaranya adalah :

1. Untuk mengantisipasi lambatnya laju pertumbuhan populasi khususnya sapi potong maka perlu pembenahan dalam sistem perbibitan. Untuk itu perlu peningkatan kerjasama dengan pihak perkebunan dan agroindustri perkebunan sebagai sumber bahan pakan dan Kawasan pengembangan peternakan yang difasilitasi pemerintah daerah dan didukung oleh pemerintah pusat. Disamping itu perlu juga peningkatan kemampuan SDM peternak dan aparat Pembina, peningkatan peran dan fungsi kelembagaan peternak, serta peningkatan fasilitas penunjang peternakan dalam rangka pengembangan peternakan khususnya dalam penyediaan bibit dan bakalan.
2. Dalam upaya mencegah masuknya Penyakit Hewan Menular (PHM) baik dari antar provinsi, antar pulau, dan antar kabupaten/kota, maka perlu ditingkatkan pengawasan yang ketat terhadap pemasukan ternak yang masuk ke wilayah Provinsi Riau dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan administrasi dan teknis serta melakukan pengujian kembali melalui pemeriksaan laboratorium terhadap ternak tersebut.

3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti dinas perhubungan, karantina, Polri dalam hal pengawasan lalu lintas ternak dan upaya penanggulangan penyakit di area cek point perbatasan.
4. Memfasilitasi dinas kabupaten/kota untuk mendapatkan dana dari APBN untuk pembangunan dan rehabilitasi RPH-R serta restrukturisasi manajemen RPH-R melalui perbaikan manajemen operasional : penguatan SDM, kelembagaan, sarana prasarana dan regulasi/peraturan pemerintah



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H.MASRUL KASMY, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : S.F. HARIYANTO
Jabatan : Pj. GUBERNUR RIAU
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 25 Maret 2024

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR RIAU



S.F. HARIYANTO

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Riau



Drs. H.MASRUL KASMY, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690301 199002 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI RIAU

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Produksi Daging	Produksi Daging (Ton)	80.632 Ton
2	Terjaminnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Status Kesehatan Hewan (%)	98,00%
		Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (%)	5%
3	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Nilai SAKIP	78 (BB)

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	15.042.305.537	APBD
2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.309.484.148	APBD
3 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner	8.539.776.453	APBD
4 Program Penyuluh Pertanian	2.287.298.689	APBD
5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Riau	30.398.599.581	APBD
6 Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	670.000.000	APBN
7 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.193.050.000	APBN
8. Program Dukungan Manajemen	286.854.000	APBN
Total	64.727.368.408	


GUBERNUR RIAU
ST. HARIYANTO

Pekanbaru, Maret 2024
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

Drs. H. MASRUL KASMY, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690301 199002 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heri Afrizon

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2024

Plt. Kepala Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Riau



Heri Afrizon

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heri Afrizon

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Riau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Agung Suganda

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

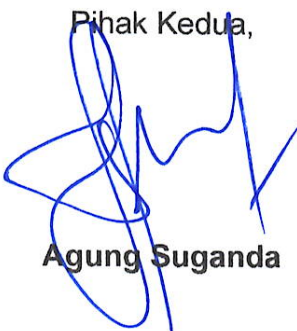
Selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,



Agung Suganda

Pihak Pertama,



Heri Afrizon

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU DENGAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. Kinerja Bulanan

1. Pencapaian Target Kinerja Output Kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi **Rp 2.415.734.000,- (Dua Milyar Empat ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Pulu Empat Ribu Rupiah);**
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif pada bulan: I (1%); II (10%); III (30%); IV (40%); V (50%); VI (60%); VII (70%); VIII (80%); IX(90,0%); X (95%); XI (98%); dan XII (100%);
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik bulanan dalam penyerapan anggaran,
4. Penyelesaian Kerugian Negara (KN): -

II. Kinerja Tahunan

1. Target Kinerja Populasi dan Produksi

No.	Komoditas	Populasi (ekor)	Produksi Daging (Meat Yield, Ton)	Produksi Telur (Ton)	Produksi Susu (Ton)
1.	Sapi Potong	178.360	14.256	-	-
2.	Sapi Perah	117	-	-	37
3.	Kerbau	14.938	1.473	-	-
4.	Kambing	152.196	1.617	-	-
5.	Domba	8.153	46	-	-
6.	Ayam Pedaging	57.396.720	60.466.	-	-
7.	Ayam Petelur	86.775	-	1.122	-
8.	Ayam Lokal	1.725.419	2.414	3.306	-
9.	Itik	98.476	175	782	-
10.	Babi	59.513	1.442	-	-

2. Target Kinerja Kegiatan

No	Uraian	Target	Satuan
1	Layanan Kesehatan Hewan	35.000	Layanan
2	Layanan Optimalisasi Reproduksi	12.800	Layanan
3	Ternak Yang Didata dan Ditandai	5.915	Unit
4	Layanan BMN	1	Layanan
5	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan
6	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6	Dokumen
7	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen
8	Layanan Manajemen Keuangan	4	Dokumen
9	Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	1	Lembaga
10	Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	2	Unit
11	Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	2	Unit

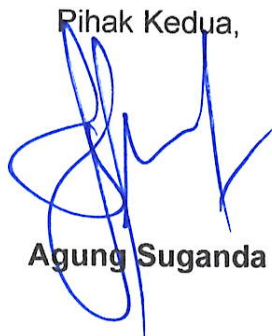
III. Alokasi Kegiatan dan Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran	
1.	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	Rp	583.880.000
2.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Rp	875.000.000
3.	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	Rp	670.000.000
4.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp	286.854.000
Jumlah		Rp	2.415.734.000

No	Kegiatan	Anggaran
Terbilang : Dua Milyar Empat ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah		

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,



Agung Suganda

Pihak Pertama,



Heri Afrizon